

PERENCANAAN DAKWAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN

PERWAKILAN WILAYAH SUMATERA BARAT

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Sebagai Salah
Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada
Program Studi Manajemen Dakwah*



Oleh :

HIDAYATUL FIKRI

NIM. 2112030041

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

1448 H/ 2026 M

PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat”** adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan tiruan ataupun duplikasi dari skripsi atau karya yang sudah dipublikasikan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di Perguruan Tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tidak orisinal, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, 18 Agustus 2026

Saya yang menyatakan



Hidayatul Fikri

NIM 2112030041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **“Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat”** disusun oleh **Hidayatul Fikri** dengan NIM **2112030041** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Padang, 18 Agustus 2026

Disetujui oleh

Pembimbing 1



Drs. Alfian, MM

NIP. 196811251997031002

Pembimbing 2



Arina Fransiska, MM

NIP. 198411062019032013

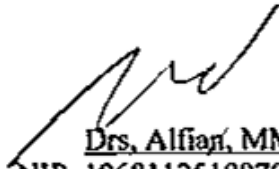
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul **"Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat."** Disusun oleh Hidayatul Fikri NIM. 2112030041 telah diuji dalam sidang Munqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Rabu 3 September 2026 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Program Studi Manajemen Dakwah..

Padang, 15 September 2026

Tim Penguji

Ketua


Drs. Alfian, MM
NIP. 196811251997031002

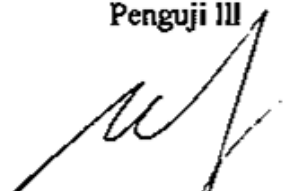
Penguji I


Dr. Jusmawati, S.Ag. M.Pd
NIP. 197302041999032002

Penguji II


Drs. Efrizal, M.Pd
NIP. 196408252003021001

Penguji III


Drs. Alfian, MM
NIP. 196811251997031002

Penguji IV


Arina Fransiska, MM
NIP. 19841106201903014

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Imam Bonjol Padang



H. Mursyid, S.Ag. M.Pd
NIP. 196307012007101010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat.” Disusun oleh Hidayatul Fikri NIM. 2112030041 Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah pada organisasi politik agar kegiatan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dakwah, pembinaan kader, kegiatan keagamaan, silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat, kunjungan ke pondok pesantren, serta kegiatan sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui kebijakan publik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan program, pengaturan waktu, dan pengelolaan sumber daya keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dakwah Partai Kebangkitan Bangsa pada DPW PKB Sumatera Barat yang meliputi aspek pemrograman, penjadwalan, dan penganggaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di DPW PKB Sumatera Barat. Informan penelitian berjumlah tiga orang yang terdiri dari unsur pengurus DPW PKB Sumatera Barat dan dipilih berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mereka terhadap kegiatan organisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemrograman dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilaksanakan melalui penyusunan berbagai program pembinaan kader dan kegiatan keagamaan. Program tersebut meliputi Sekolah Kader Pertama (SKP), Pendidikan Kader Menengah (PKM), pendidikan kajian nasional, pengajian, ceramah keagamaan bersama kiai, ulama dan tuanku, kunjungan ke pondok pesantren, serta kegiatan sosial dan perjuangan aspirasi masyarakat melalui kebijakan publik. 2) penjadwalan dakwah dilakukan secara sistematis melalui koordinasi antara DPP, DPW, dan DPC serta mempertimbangkan agenda organisasi, kesiapan anggaran, narasumber, peserta, lokasi, dan kondisi organisasi. Apabila terjadi perubahan atau benturan jadwal, dilakukan penyesuaian melalui koordinasi agar kegiatan tetap dapat terlaksana. 3) penganggaran dakwah disusun berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan dan ketentuan organisasi. Sumber pendanaan berasal dari bantuan keuangan partai politik, iuran anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, anggota DPR RI, iuran fraksi, serta dana operasional partai. Pengelolaan anggaran dilakukan oleh bendahara dan sekretariat dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Perencanaan Dakwah, Pemrograman, Penjadwalan, Penganggaran, DPW PKB Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT terhadap limpahan rahmat, dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat”. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk agama Allah SWT, dari zaman dengan penuh kegelapan menuju zaman terang benderang penuh ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan umatnya bagaimana keutamaan menuntut ilmu sehingga penulis dapat memahami dan menguasai ilmu dan meningkatkan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kesuksesan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

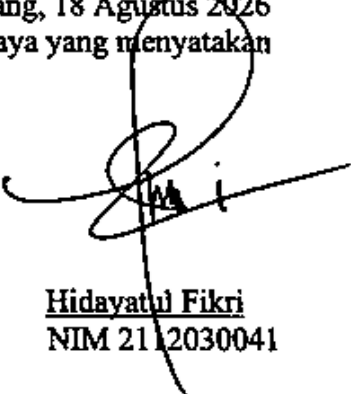
1. Teristimewa kedua orang tua tercinta skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada Ibunda tercinta Ibu Kartini, yang tak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan dalam setiap langkah penulis. Untuk Almarhum Ayah tercinta, Ayah Josman meskipun telah tiada, cinta, doa, nasihat, dan segala kebaikan Ayah akan selalu hidup dalam hati penulis dan menjadi kekuatan untuk terus melangkah.
2. Bapak H. Hendrajoni, S.H, M.H Bunda Dr. Hj. Lida Hendrajoni S.E, M.M.Tr dan Bundo Indraniawati yang senantiasa mendukung proses akademik saya selama perkuliahan, memberikan motivasi dan arahan ke arah yang lebih baik.
3. Rektorat dan jajarannya terkhusus Rektor Bunda Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M. Pd dan Wakil Retor 2 Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag yang sudah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Murisal, M.Ag beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memfasilitasi penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Alfian, MM dan Pembimbing II Ibu Arina

masukannya, pengetahuan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan serta arahan ke arah yang lebih baik.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang senantiasa memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis. Terkhusus kepada Ibu Fifi dan Ibu Meri yang sudah membantu penulis selama proses perkuliahan.
7. Segenap pengurus DPW PKB Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian untuk skripsi ini. Terima kasih untuk setiap kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian skripsi ini.
8. Untuk keluarga tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Kalian adalah salah satu alasan penulis terus berjuang hingga sampai di titik ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir, menemani setiap proses, berbagi suka dan duka, serta saling menguatkan hingga kita sampai di titik ini. Semoga segala perjuangan dan kebersamaan kita menjadi kenangan yang indah.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Padang, 18 Agustus 2026
Saya yang menyatakan



Hidayatul Fikri
NIM 2112030041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEORISINALAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Penjelasan Judul.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II: LANDASAN TEORI	21
A. Perencanaan Dakwah.....	21
1. Pengertian Perencanaan Dakwah.....	21
2. Komponen-komponen Perencanaan Dakwah	35
3. Proses Perencanaan Dakwah.....	36
4. Manfaat Perencanaan dalam Dakwah.....	36

B. Partai Kebangkitan Bangsa	38
1. Konsep Partai Politik dalam Sistem Demokrasi.....	38
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	39
3. Teori Organisasi Politik dan Struktur PKB.....	40
4. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB.....	41
C. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Metode Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	47
C. Informan Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan Data	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN	53
A. Deskripsi Informan Penelitian.....	53
B. Temuan Umum.....	56
1. Profil DPW PKB Provinsi Sumatera Barat.....	56
2. Mabda Siyasi dan Kebijakan Strategi DPW PKB Sumatera Barat.....	60
C. Temuan Khusus	65
1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat.....	65
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat.....	70
3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat.....	76

C. Analisis Hasil Penelitian.....	82
BAB V: PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
C. Keterbatasan penelitian.	88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat Sisa Masa Bakti 2026- 2031.....	59
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor DPW PKB Kota Padang.....	56
Gambar 4. 2 Poster Mabda Siyasi PKB.....	60
Gambar 4. 3 Kegiatan Kaderisasi.....	66
Gambar 4. 4 Rapat Perencanaan.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah perwujudan segala kebajikan. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepada-Nya sebagai kebajikan tertinggi dan ketakwaan berada di urutan kedua setelah keimanan. Seorang hamba dapat menunjukkan kesetiaannya dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang-Nya. Dakwah hakikatnya adalah usaha untuk merangsang kecenderungan dan minat. Ketika seorang da'i mengajak seseorang masuk Islam, dia sedang berusaha untuk menarik perhatian mereka dan mendorong kecenderungan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, dakwah mencakup seluruh upaya verbal dan nonverbal (lisan al-hal dan maqal) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kecenderungan dan minat terhadap Islam (Uswatun Hasanah, 2010).

Dalam buku Materi Manajemen Dakwah karya Mustain (2011) dakwah adalah tindakan untuk menginspirasi, berinovasi, dan memotivasi orang lain untuk mengikuti jalan Allah Swt. berdasarkan hukum islam. Tujuan dakwah adalah untuk mengubah individu dari keadaan yang tidak menguntungkan ke keadaan yang menguntungkan (Abdullah, 2019).

Misalnya saja berpindah dari keadaan kafir ke iman, dari kemelaratan kekayaan, dari perpecahan ke persatuan, dan dari kemaksiatan ke ketaatan demi mendapatkan ridha dari Allah Swt. Sehingga umat Islam selalu terlibat dalam melawan segala bentuk kezaliman.

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik laki-laki, maupun perempuan guna menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan dakwah secara individual tidak akan membantu dalam mengatasi permasalahan dakwah yang semakin berkembang dan serius; sebaliknya, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan unit yang terorganisir dengan baik dan rapi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan secara kolektif dan terorganisir, bukan individual semata. Hal ini menjadi dasar normatif perlunya lembaga dakwah yang memiliki perencanaan (Munir & Ilaihi, 2006). Ayat ini juga memberikan seruan kepada umat Islam untuk berorganisasi dalam komunitas atau kelompok

yang tugasnya antara lain menegakkan apa yang ma'ruf (kebaikan), menyerukan kebajikan, dan menghentikan kejahatan (kemaksiatan). Usaha yang luar biasa ini bukan hanya tugas individu, hal ini juga perlu dilakukan oleh masyarakat atau kelompok secara keseluruhan. Bersatu sebagai sebuah komunitas akan membuat dakwah menjadi lebih kohesif dan kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih efektif menegakkan kewajiban umat manusia kepada Allah dan memimpin mereka ke jalan yang benar.

Ketika dakwah memasuki zaman modern, profesionalisme dan pelaksanaan prosesnya sangat diperlukan. Dakwah akan terus diamalkan sepanjang sejarah umat manusia, dan fokusnya akan terus mengarah pada hal tersebut. Menyerukan dan mengajak individu untuk mengikuti jalan Allah adalah tujuan mendasar dari dakwah Islam dan menjadikan Islam sebagai landasan seluruh upaya manusia dan kehidupan orang-orang yang didukungnya. Kegiatan yang berkaitan dengan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan keampuannya (Aziz, 2009).

Salah satu cara yang sangat berhasil adalah melalui dakwah politik atau siyasah. Dakwah siyasah, sederhananya, adalah dakwah institusional yang mempunyai tujuan Islam. Dakwah politik yang disebut juga siyasa merupakan salah satu jenis

dakwah yang memperjuangkan Islam dengan memanfaatkan otoritas, birokrasi, dan partai politik sebagai senjatanya. gerakan misionaris yang berpengaruh (Natsir, 2008).

Aktivitas dakwah dalam konteks organisasi dan partai politik memiliki legitimasi hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik tersebut mencakup pembinaan nilai, moral, dan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dakwah politik dapat dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan (UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 11).

Partai politik adalah suatu lembaga atau organisasi yang terkait erat dengan strategi yang digunakannya untuk mencapai tujuannya (Budiarjo, 2008). Partai politik adalah sekelompok orang yang stabil yang bertujuan untuk mengambil alih atau memegang kekuasaan dalam pemerintahan untuk kepemimpinan partai dan, sebagai imbalannya, memberikan keuntungan intelektual atau materi kepada anggota partai.

Partai politik merupakan organisasi yang bekerja untuk memperjuangkan cita-cita tertentu. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut, maka butuh perencanaan yang baik, pengorganisasian, mengatur tugas-tugas di masa depan, melaksanakannya, dan menegakkan aturan main untuk mengatur perilaku peserta dan menjaga kemampuan organisasi agar berfungsi secara efektif dan efisien. Mencapai tujuan dakwah tidak mungkin dipisahkan secara efektif dan efisien dari kemampuan mengorganisir dan mempersiapkan dakwah dengan cara yang memperhitungkan semua potensi hasil. Artinya, perencanaan yang tepat, akurat, dan komprehensif harus menjadi langkah awal dalam proses dakwah (Alfian, 2018).

Menurut Malayu Hasibuan (2016) Kapasitas manusia pada dasarnya terbatas dalam hal fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian, namun tuntutananya tidak terbatas. Upaya untuk memuaskan kebutuhan dan keterbatasan kapasitas untuk menyelesaikan tugas adalah hal yang memotivasi untuk membagi tugas, kewajiban, dan pekerjaan. Hubungan formal dengan suatu organisasi atau lembaga dikembangkan melalui kerja sama dan kolaborasi melalui pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Ketika tujuan yang dimaksudkan dalam organisasi tercapai, maka aktivitas manajerial akan selesai secara efektif.

Langkah pertama dalam setiap aktivitas manajerial adalah perencanaan. Karena operasional manajerial masih memerlukan rencana, betapapun sempurnanya, tetap saja belum sempurna. Menurut George R.Terry (2013) Perencanaan adalah proses memilih, mengikat, dan memanfaatkan asumsi-asumsi tentang masa depan untuk mengkarakterisasi dan menguraikan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Perencanaan, menurut George R.Terry (2013) adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta menciptakan dan menerapkan asumsi tentang masa depan untuk memvisualisasikan dan merumuskan saran tindakan yang dianggap diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Kegiatan yang direncanakan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan. Organisasi memerlukan titik acuan untuk bertindak secara terukur dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pada dasarnya membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tugas. Karena visi dan misi suatu organisasi dapat berfungsi secara efektif dan akurat jika disertai perencanaan.

Teori Louis A. Allen tentang fungsi perencanaan sebagaimana dikutip dalam karya Karyoto (2002). Teori ini menekankan bahwa perencanaan adalah fungsi dasar dalam manajemen yang menjadi landasan bagi fungsi- fungsi

manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berikut kutipan langsung dari teori Louis A. Allen tentang fungsi perencanaan sebagaimana dikutip dalam karya Karyoto (2002). Dalam konteks ini, perencanaan mencakup aktivitas-aktivitas berikut:

1. Peramalan (Forecasting): Melakukan prediksi terhadap kondisi masa depan berdasarkan data dan informasi yang tersedia.
2. Penetapan Tujuan (Establishing Objectives): Menentukan sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai.
3. Pemrograman (Programming): Menyusun langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
4. Penjadwalan (Scheduling): Menentukan waktu pelaksanaan setiap langkah atau tindakan dalam rencana.
5. Penganggaran (Budgeting): Mengalokasikan sumber daya, terutama keuangan, untuk mendukung pelaksanaan rencana.
6. Pengembangan Prosedur (Developing Procedures): Membuat pedoman atau metode kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan rencana.
7. Penetapan dan Interpretasi Kebijakan (Establishing and Interpreting Policies): Menentukan kebijakan yang akan mengarahkan pelaksanaan rencana dan memastikan pemahaman yang tepat terhadap kebijakan tersebut.

Pemilihan tiga aspek perencanaan yaitu pemrograman (programming), penjadwalan (scheduling), dan penganggaran (budgeting) didasarkan pada temuan awal di lapangan yang menunjukkan bahwa permasalahan perencanaan dakwah lebih dominan terlihat pada penyusunan program, pengaturan jadwal kegiatan, dan penganggaran pelaksanaan dakwah. Selain itu, pembatasan pada tiga aspek dilakukan untuk menjaga fokus penelitian agar tidak terlalu luas sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Dengan demikian, pemilihan ketiga aspek tersebut dianggap paling representatif dalam menggambarkan proses perencanaan dakwah yang dilakukan oleh organisasi secara nyata.

Dalam Lanskap Indonesia Partai Kebangkitan Bangsa resmi didirikan pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 H / 23 Juli 1998 di Jakarta. Para deklaratornya adalah para kyai dan ulama yang menjadi tokoh penting dalam organisasi kemasyarakatan Nadhlatul Ulama, antara lain Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Mubadi. Alhasil, hal ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi pembangunan nasional dan daerah Partai Kebangkitan Bangsa (Abdurrahman, 1998)

Sumatera Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan tradisi minangkabau yang sangat kental dengan budaya dan agama, memiliki potensi besar untuk penerapan dakwah politik. Di provinsi ini, peran agama dalam kehidupan

sosial dan politik sangat dominan. Oleh karena itu, komunikasi politik yang melibatkan nilai-nilai agama memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk persepsi dan dukungan masyarakat terhadap partai politik (Firmanzah, 2011). Dalam konteks ini, PKB memiliki peluang besar untuk memanfaatkan dakwah sebagai sarana untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan sosial dan moral, serta memperkenalkan program-program politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Namun, untuk mencapai keberhasilan tersebut, dibutuhkan perencanaan dakwah yang matang dan terstruktur. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, pesan dakwah yang disampaikan bisa saja tidak efektif atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman (Munir & Ilaihi, 2006). Dalam prakteknya, PKB di Sumatera Barat harus mampu menyesuaikan pendekatan dakwah dengan karakteristik masyarakat lokal yang sangat menghargai nilai-nilai tradisi dan agama, sekaligus mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang di tengah-tengah mereka. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial-politik yang menjadi perhatian utama masyarakat setempat, serta bagaimana dakwah tersebut dapat menghubungkan ideologi partai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Sumatera Barat.

Perencanaan dakwah partai politik ini tidak hanya penting dalam konteks penyampaian pesan agama, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun jaringan politik yang solid, menguatkan posisi partai, serta memperluas pengaruh PKB di Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merencanakan strategi dakwah yang tepat bagi PKB Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan budaya setempat, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan partai di wilayah tersebut.

Salah satu kehadiran kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat di Jalan Belanti Raya, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, merupakan bukti konkret aktivitas kelembagaan partai politik di tingkat daerah. Kantor ini diresmikan pada 26 Februari 2021 sebagai pusat pengelolaan organisasi dan konsolidasi kader PKB di Sumatera Barat. Secara fisik dan administratif, keberadaan kantor ini menunjukkan upaya partai dalam membangun struktur permanen dan memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat Sumatera Barat, sebuah provinsi yang secara historis memiliki karakteristik politik yang kuat dan unik.

Secara faktual, dakwah dalam partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilu dan politik lokal, terutama di daerah dengan populasi Muslim yang besar seperti Sumatera Barat (Bachtiar, 2014). Pada pemilu sebelumnya, PKB menunjukkan bahwa pendekatan dakwah dapat memperkuat posisi partai dalam memenangkan suara, karena pemilih di wilayah tersebut cenderung memilih partai yang menawarkan nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan mereka. PKB, dengan visi dan misi yang berorientasi pada kesejahteraan umat serta memperkuat nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, menjadikan dakwah sebagai alat penting untuk meraih simpati dan dukungan. Dengan demikian, perencanaan dakwah yang tepat akan memiliki dampak langsung terhadap hasil politik yang diinginkan oleh PKB di wilayah ini.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat telah berjalan sebagai bagian dari aktivitas organisasi partai. Dakwah tersebut umumnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan, silaturahmi dengan tokoh masyarakat, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini menjadi sarana bagi PKB untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyampaikan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Namun, secara faktual di lapangan terlihat bahwa kegiatan dakwah tersebut belum selalu disusun dalam satu perencanaan yang tertulis dan terstruktur untuk jangka waktu tertentu. Beberapa kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan agenda partai, undangan masyarakat, atau momentum tertentu, sehingga perencanaan dakwah cenderung bersifat praktis dan situasional. Kondisi ini merupakan hal yang umum terjadi dalam organisasi, terutama pada tingkat daerah, dan tidak dapat dipandang sebagai kesalahan, melainkan sebagai tantangan dalam pengelolaan kegiatan dakwah (Hasibuan, 2016).

Selain itu, dalam pelaksanaannya, pengaturan waktu kegiatan dakwah sering kali harus menyesuaikan dengan kesibukan pengurus, agenda partai, serta aktivitas masyarakat. Penyesuaian ini menyebabkan jadwal kegiatan dakwah bersifat fleksibel dan terkadang berubah. Secara logis, kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan kegiatan dakwah dan tingkat kehadiran kader maupun masyarakat, meskipun kegiatan tetap dapat berjalan.

Dari sisi pembiayaan, kegiatan dakwah yang dilakukan DPW PKB Sumatera Barat umumnya menggunakan dana yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kegiatan. Dalam praktiknya, penganggaran dakwah dilakukan secara sederhana dan menyesuaikan kondisi yang ada. Hal ini merupakan kondisi

yang lazim terjadi di banyak organisasi, terutama pada tingkat daerah, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang terencana agar kegiatan dakwah dapat berjalan secara berkelanjutan (Handoko, 2012).

Organisasi PKB di Sumatera Barat, baik pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) maupun tingkat cabang, terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan organisasi dakwah yang digerakkan oleh partai memberikan gambaran tentang bagaimana PKB berusaha untuk membangun hubungan dengan berbagai kelompok sosial, terutama kelompok agama dan pesantren yang memiliki pengaruh besar di Sumatera Barat. Dakwah yang dilakukan PKB bukan hanya terbatas pada kegiatan agama formal, tetapi juga melibatkan program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan agama, serta penyuluhan politik yang mencakup nilai-nilai Islam dan kebangsaan (Azra, 2000).

Secara faktual, tantangan terbesar dalam perencanaan dakwah politik di Sumatera Barat adalah keberagaman dalam cara pandang masyarakat terhadap hubungan agama dan politik. Sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat cenderung lebih konservatif, sementara sebagian lainnya memiliki pandangan yang lebih progresif. Dalam konteks ini, PKB dihadapkan pada

tantangan untuk mengakomodasi kedua kelompok ini, sambil tetap menjaga kesatuan dan soliditas dalam menyampaikan pesan dakwah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat. Namun, hal ini juga memberikan peluang bagi PKB untuk memperkenalkan dakwah yang inklusif, yang mengutamakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, serta membangun kesadaran politik yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial dan teknologi menjadi bagian integral dari strategi dakwah politik. Di Sumatera Barat, seperti di banyak daerah lainnya, media sosial menjadi platform penting dalam menyebarkan informasi dan melakukan kampanye politik. PKB, dengan memanfaatkan media sosial, dapat menyebarkan pesan dakwah secara lebih luas, efektif, dan tepat sasaran, baik melalui konten berbasis video, infografis, maupun tulisan yang sesuai dengan bahasa dan karakteristik masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, perencanaan dakwah PKB harus mempertimbangkan pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang lebih modern dan terkini

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki demografi yang mayoritas beragama Islam, dengan tradisi Minangkabau yang sangat kental. Mayoritas masyarakat

Kota Padang menjalani kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal, yang menjadikan dakwah Islam sebagai pendekatan yang sangat relevan. Hal ini membuka peluang besar bagi PKB untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang berbasis pada ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan yang juga menghormati adat istiadat Minangkabau. Dalam konteks sosial-politik, PKB telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga dakwah mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Padang (Mulyadi, 2003).

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan di sini adalah **“Bagaimana Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat ?”**

C. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat
3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh tanggapan yang lebih tepat dan memperkuat justifikasi sebelumnya dari kerangka rumusan masalah penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pemrograman Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui Penjadwalan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Penganggaran Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam program studi Strata Satu (S1) pada Prodi Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa sebagai bahan masukan untuk memberikan kontribusi aktif agar Partai Kebangkitan

Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat semakin berkembang dalam melaksanakan dakwah sehingga dapat mencapai tujuannya.

3. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada Prodi Manajemen Dakwah (MD) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
4. Untuk memperkaya pengetahuan peneliti tentang penelitian dan dapat dijadikan asumsi dasar untuk merangsang peneliti berikutnya yang terkait masalah yang sama.

F. Penjelasan Judul

Untuk mencegah kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, penulis berpendapat penting untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, yaitu :

Perencanaan : Menurut George R, Terry (2013) istilah “Perencanaan” dapat diartikan sebagai proses memilih, mengikat, dan memanfaatkan asumsi-asumsi tentang masa depan untuk mengkarakterisasi dan menguraikan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Dakwah : Dakwah adalah tindakan untuk menginspirasi,

berinovasi, dan memotivasi orang lain untuk mengikuti jalan Allah Swt. berdasarkan hukum islam (Mustain,2011). Dakwah juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah individu dari keadaan yang tidak menguntungkan ke keadaan yang menguntungkan. Misalnya saja berpindah dari keadaan kafir ke iman, dari kemelaratan ke kekayaan, dari perpecahan ke persatuan, dan dari kemaksiatan ke ketaatan demi mendapatkan ridha dari Allah Swt. Sehingga umat Islam selalu terlibat dalam melawan segala bentuk kezaliman (Qadaruddin Abdullah,2019).

Partai Politik : Partai politik adalah suatu lembaga atau organisasi yang terkait erat dengan strategi yang digunakannya untuk mencapai tujuannya. Partai politik adalah sekelompok orang yang stabil yang bertujuan untuk mengambil alih atau memegang kekuasaan dalam pemerintahan untuk kepemimpinan partai dan, sebagai imbalannya, memberikan keuntungan intelektual atau materi kepada anggota partai (Budiarjo,2008).

DPW PKB Sumbar: Nama sebuah partai politik yang dikelola oleh beberapa orang yang berpusat di Kota Padang.

Jadi, maksud judul diatas adalah bagaimana penerapan fungsi fungsi perencanaan dakwah yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penelitian ini, penulis akan menampilkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini tercakup pengantar yang mencakup latar belakang, klarifikasi istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta urutan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, akan diulas literatur yang melibatkan studi-studi sebelumnya, analisis teori yang relevan, dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penelitian akan diuraikan secara rinci, melibatkan jenis penelitian, pendekatan, lokasi, waktu, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data. Semua aspek ini akan dijelaskan sesuai format dan aturan penulisan skripsi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat data mengenai hasil penelitian pembahasan serta analisa tentang judul.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERENCANAAN DAKWAH

1. Pengertian Perencanaan Dakwah

Perencanaan dakwah merupakan proses penting dalam manajemen kegiatan dakwah Islam agar terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai tujuan syar'i. Abdul Aziz (2004) menyatakan bahwa perencanaan dakwah adalah rangkaian langkah sistematis dalam menentukan arah, strategi, serta metode dakwah guna mencapai perubahan sosial dan spiritual yang diinginkan dalam masyarakat. Muhammad Aziz (2012) menegaskan bahwa dakwah yang berjalan tanpa perencanaan ibarat kapal tanpa kemudi—berjalan tanpa arah dan rentan menyimpang dari tujuan hakiki dakwah Islam. Dalam konteks modern, perencanaan dakwah menjadi instrumen vital agar nilai-nilai Islam mampu diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

2. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Dakwah

Perencanaan dakwah bertujuan mengarahkan semua aktivitas dakwah agar terorganisir dan mampu menjangkau sasaran yang tepat secara optimal. Abdul Aziz (2004) menguraikan

bahwa fungsi utama perencanaan dakwah adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, alat kontrol, serta sarana untuk evaluasi dan pengambilan keputusan dakwah yang berkesinambungan. Dengan adanya perencanaan, para dai dapat mengatur waktu, metode, dan sumber daya dakwah secara efisien serta menghindari tindakan yang sporadis dan tidak terukur. Fungsi lainnya adalah untuk mengidentifikasi tantangan eksternal dan internal agar kegiatan dakwah dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Teori Louis A. Allen tentang fungsi perencanaan sebagaimana dikutip dalam karya Karyoto (2002). Teori ini menekankan bahwa perencanaan adalah fungsi dasar dalam manajemen yang menjadi landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berikut kutipan langsung dari teori Louis A. Allen tentang fungsi perencanaan sebagaimana dikutip dalam karya Karyoto (2002). Dalam konteks ini, perencanaan mencakup aktivitas-aktivitas berikut:

1. Peramalan (Forecasting): Melakukan prediksi terhadap kondisi masa depan berdasarkan data dan informasi yang tersedia.
2. Penetapan Tujuan (Establishing Objectives): Menentukan sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai.
3. Pemrograman (Programming): Menyusun langkah-langkah

atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

4. Penjadwalan (Scheduling): Menentukan waktu pelaksanaan setiap langkah atau tindakan dalam rencana.
5. Penganggaran (Budgeting): Mengalokasikan sumber daya, terutama keuangan, untuk mendukung pelaksanaan rencana.
6. Pengembangan Prosedur (Developing Procedures): Membuat pedoman atau metode kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan rencana.
7. Penetapan dan Interpretasi Kebijakan (Establishing and Interpreting Policies): Menentukan kebijakan yang akan mengarahkan pelaksanaan rencana dan memastikan pemahaman yang tepat terhadap kebijakan tersebut.

Namun, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tiga teori saja. Yaitu berfokus pada pemrograman (programming), penjadwalan (scheduling), penganggaran (budgeting)::

1. Pemrograman (Programming)

Pemrograman adalah tahapan selanjutnya setelah tujuan dirumuskan secara jelas. Louis A. Allen menyebut pemrograman sebagai proses penyusunan urutan langkah-langkah kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Karyoto, 2002). Dalam konteks dakwah, pemrograman berarti merancang kegiatan dakwah secara terstruktur mulai dari jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, sasaran peserta, media yang digunakan, hingga

alokasi sumber daya. Tahapan ini menjadi sangat penting agar kegiatan dakwah tidak hanya bersifat reaktif atau insidental, tetapi benar- benar terencana dan berorientasi hasil.

Pemrograman adalah langkah selanjutnya setelah tujuan ditetapkan, di mana organisasi merencanakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Allen (dalam Karyoto, 2002) mengungkapkan bahwa pemrograman adalah proses mengidentifikasi dan merancang berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tahap ini bertujuan untuk menentukan urutan kegiatan, siapa yang akan melaksanakannya, kapan kegiatan tersebut dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Dalam proses ini, dibutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.

Pemrograman berfungsi untuk menghindari tindakan yang tumpang tindih atau tidak terorganisir dalam pelaksanaan tujuan. Jika tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak ada rencana atau program yang jelas, maka pencapaian tujuan tersebut bisa menjadi sulit atau bahkan gagal. Oleh karena itu, pemrograman harus menyusun langkah-langkah yang terstruktur, termasuk jadwal kegiatan, anggaran, dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya pemrograman yang matang, organisasi akan memiliki panduan jelas dalam menjalankan aktivitasnya (Siagian, 2005).

Selain itu, pemrograman juga memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien. Dalam organisasi besar, seringkali terdapat keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan finansial. Pemrograman yang baik memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru, pemrograman akan mencakup penentuan siapa yang akan bertanggung jawab untuk riset pasar, produksi, pemasaran, dan distribusi produk tersebut. Semua aspek ini perlu diprogramkan secara jelas agar tidak ada yang terlewat. Dalam pemrograman, penting juga untuk merencanakan langkah-langkah kontingensi atau cadangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap rencana yang dibuat harus mengantisipasi kemungkinan masalah yang dapat muncul di lapangan. Dengan demikian, pemrograman tidak hanya mencakup rencana utama, tetapi juga solusi alternatif atau penyesuaian terhadap perubahan situasi. Hal ini sangat penting agar organisasi dapat tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi kendala yang tak terduga.

Secara keseluruhan, pemrograman adalah langkah yang mendetail dalam perencanaan yang berfungsi untuk mengatur bagaimana tujuan dapat dicapai dengan efisien. Tanpa pemrograman yang baik, tujuan yang telah ditetapkan bisa sulit

untuk dicapai. Pemrograman menghubungkan tujuan dengan tindakan yang nyata, memberikan struktur pada pelaksanaan dan memastikan bahwa setiap elemen organisasi bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan (Karyoto, 2002).

Dalam perencanaan dakwah, pemrograman mencakup penyusunan agenda kegiatan seperti kajian rutin, pelatihan dakwah, dakwah tematik, dakwah media, hingga pengabdian masyarakat. Setiap program tersebut harus disusun secara rinci berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, jika tujuan dakwah adalah meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan masjid, maka program yang dirancang bisa berupa workshop dakwah digital, komunitas remaja masjid, atau kelas public speaking Islami (Mulyadi, 2012). Pemrograman semacam ini membantu agar strategi dakwah tetap fokus dan terukur dalam pelaksanaannya.

Pemrograman juga memfasilitasi pembagian kerja di antara tim pelaksana dakwah. Setiap kegiatan dakwah pasti membutuhkan sumber daya manusia, waktu, tempat, dan dana. Melalui pemrograman yang baik, semua elemen ini bisa diorganisasi secara efisien. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab sebagai pemateri, siapa yang mengelola media publikasi, dan siapa yang menangani evaluasi hasil kegiatan. Dengan pemrograman, tidak ada bagian dari kegiatan dakwah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa

koordinasi . Ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya urusan spiritual, tetapi juga memerlukan manajemen yang baik.

Selain itu, pemrograman dalam dakwah harus fleksibel namun terarah. Artinya, program dakwah harus mampu beradaptasi dengan perubahan di lapangan, namun tidak kehilangan arah dari tujuan utamanya. Dalam dunia nyata, tidak jarang rencana harus disesuaikan karena adanya kendala teknis atau situasi yang tidak terduga. Maka, perencanaan dakwah yang baik adalah yang tetap memiliki kerangka kerja yang kokoh, namun cukup lentur untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan (Siagian, 2005). Inilah pentingnya menyusun program yang matang namun dinamis.

Dengan pemrograman yang sistematis, perencanaan dakwah menjadi nyata dan dapat diimplementasikan secara efektif. Pemrograman bukan hanya menyusun daftar kegiatan, tetapi juga merumuskan strategi implementasi, waktu pelaksanaan, dan alat evaluasi. Kegiatan dakwah yang dirancang melalui pemrograman yang baik akan lebih mudah dikendalikan, diukur keberhasilannya, dan diperbaiki jika diperlukan. Oleh karena itu, pemrograman menjadi pilar penting dalam manajemen dakwah yang modern dan profesional (Karyoto, 2002).

2. Penjadwalan (Scheduling)

Penjadwalan (Scheduling) merupakan proses penting dalam perencanaan yang bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan dari setiap aktivitas atau langkah yang telah dirancang. Penjadwalan

membantu organisasi memastikan bahwa kegiatan dilakukan dalam urutan yang tepat, sesuai waktu, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Melalui penjadwalan, manajer dapat menetapkan kapan suatu kegiatan dimulai, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan kapan seharusnya selesai, serta bagaimana urutan kegiatan tersebut saling berkaitan. Teknik yang umum digunakan dalam penjadwalan termasuk Gantt Chart, PERT (Program Evaluation and Review Technique), dan CPM (Critical Path Method), yang memudahkan dalam memvisualisasikan dan mengelola durasi proyek secara keseluruhan. Penjadwalan yang efektif tidak hanya mendukung ketepatan waktu dalam pencapaian tujuan, tetapi juga menjadi alat koordinasi dan pengendalian bagi berbagai bagian dalam organisasi. Penjadwalan adalah elemen vital dalam manajemen proyek karena berfungsi sebagai pengendali waktu dan alat komunikasi antar tim.

Penjadwalan merupakan salah satu elemen penting dalam proses perencanaan manajerial yang berfungsi untuk mengatur waktu pelaksanaan setiap aktivitas yang telah diprogramkan dalam rencana kerja. Penjadwalan bukan sekadar menentukan kapan suatu kegiatan dimulai dan berakhir, tetapi juga mencakup penetapan urutan kegiatan berdasarkan prioritas, ketergantungan antarkegiatan (dependency), serta pemanfaatan sumber daya secara optimal agar tidak terjadi penumpukan atau kekosongan kapasitas. Dalam konteks organisasi atau proyek, penjadwalan yang baik sangat menentukan efisiensi operasional dan ketepatan waktu

pencapaian tujuan. Dengan menjadwalkan kegiatan secara sistematis, manajer dapat meminimalkan waktu tunggu (idle time), menghindari konflik jadwal antar kegiatan atau unit kerja, dan mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul di tengah pelaksanaan.

Beberapa teknik dan alat bantu yang umum digunakan dalam penjadwalan antara lain Gantt Chart, yang memberikan gambaran visual mengenai kapan aktivitas dimulai dan berakhir; Critical Path Method (CPM) yang membantu mengidentifikasi jalur kritis dan aktivitas yang memiliki kelonggaran waktu; serta Program Evaluation and Review Technique (PERT) yang mengakomodasi ketidakpastian dalam durasi waktu dengan menggunakan estimasi probabilistik. Dalam organisasi besar, sistem informasi manajemen proyek (Project Management Information System/PMIS) juga digunakan untuk mendukung penjadwalan secara otomatis dan real-time.

Penjadwalan juga memiliki fungsi strategis sebagai alat kontrol dan pengawasan. Dengan adanya jadwal yang jelas, manajer dapat memantau progres kegiatan secara berkala, mengevaluasi keterlambatan, serta melakukan tindakan korektif jika ada penyimpangan dari rencana semula. Kerzner (2017) menyatakan bahwa penjadwalan adalah inti dari pengendalian proyek karena memungkinkan tim manajemen untuk mendeteksi

masalah lebih awal, merencanakan tindakan perbaikan, dan menjaga proyek tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penjadwalan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga sebagai alat manajerial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Dalam konteks perencanaan dakwah, penjadwalan memegang peranan penting sebagai instrumen untuk mengatur waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan dakwah agar berjalan sistematis dan terkoordinasi. Dakwah sebagai sebuah proses komunikasi dan transformasi sosial memerlukan manajemen waktu yang baik agar pesan dakwah dapat sampai kepada sasaran secara tepat dan berkelanjutan. Penjadwalan dalam dakwah tidak hanya mencakup kapan kegiatan dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan faktor kesiapan pendakwah, kondisi sosial masyarakat, serta momentum waktu yang strategis. Sebagai contoh, kegiatan dakwah seperti ceramah, pelatihan, kunjungan ke masyarakat, atau penyuluhan agama, harus dijadwalkan dengan memperhatikan kalender keagamaan, aktivitas masyarakat setempat, dan sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaan program dakwah, penjadwalan juga berfungsi untuk mencegah tumpang tindih kegiatan antar tim dakwah atau antara organisasi dakwah yang berbeda. Penjadwalan yang terencana dengan baik akan memberikan

ruang untuk evaluasi berkala, monitoring kemajuan, dan penyesuaian apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Di sinilah pentingnya menggunakan alat bantu seperti jadwal mingguan, kalender dakwah, hingga perangkat lunak manajemen kegiatan berbasis teknologi untuk memperkuat efektivitas perencanaan. Dalam manajemen dakwah, aspek waktu menjadi bagian dari amanah dan efisiensi kerja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-‘Asr tentang pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penjadwalan dalam dakwah tidak hanya bernilai manajerial, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah dakwah itu sendiri.

3. Penganggaran (Budgeting)

Penganggaran (Budgeting) adalah proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan. Penganggaran berfungsi sebagai panduan dalam penggunaan dana agar pelaksanaan rencana berjalan secara efisien, terkendali, dan sesuai dengan prioritas organisasi. Dalam prosesnya, penganggaran mencakup estimasi kebutuhan biaya, pembagian dana ke berbagai unit atau proyek, serta mekanisme kontrol agar tidak terjadi pemborosan. Penganggaran juga berperan dalam menilai kinerja melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi pengeluaran. Jenis

anggaran bisa berupa anggaran operasional (untuk kebutuhan rutin), anggaran modal (untuk investasi), maupun anggaran fleksibel yang dapat disesuaikan dengan dinamika aktivitas. Dengan demikian, penganggaran bukan sekadar perhitungan angka, melainkan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Anthony dan Govindarajan (2014) menekankan bahwa penganggaran bukan hanya metode untuk merencanakan pengeluaran, tetapi juga alat strategis untuk menyelaraskan sumber daya dengan prioritas organisasi.

Penganggaran adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengontrol penggunaan sumber daya keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Dalam konteks manajemen, penganggaran memiliki peran yang sangat strategis karena berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, kontrol manajerial, dan pengukuran kinerja. Melalui penganggaran, organisasi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan atau program yang telah direncanakan mendapatkan dukungan finansial yang memadai serta bahwa pengeluaran dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, penganggaran juga membantu dalam mengantisipasi kebutuhan masa depan, mengelola risiko keuangan, dan menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Tahapan dalam proses penganggaran biasanya meliputi: (1) Perencanaan anggaran, yang melibatkan identifikasi kebutuhan biaya dan estimasi pendapatan; (2) Penyusunan anggaran, di mana dana dialokasikan untuk masing-masing unit, proyek, atau aktivitas; (3) Pelaksanaan anggaran, yaitu penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan; serta (4) Evaluasi dan pengendalian anggaran, yang mencakup monitoring realisasi dan penyesuaian terhadap perubahan situasi. Ada beberapa jenis anggaran yang umum diterapkan dalam organisasi, seperti anggaran operasional (untuk kebutuhan sehari-hari), anggaran modal (untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap), serta anggaran fleksibel, yang dapat berubah sesuai dengan volume aktivitas.

Penganggaran bukan hanya alat administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang membantu organisasi menyelaraskan sumber daya dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Dalam banyak organisasi, proses penganggaran juga mencerminkan nilai-nilai dan kebijakan manajerial, karena anggaran menunjukkan area mana yang dianggap penting dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapainya. Evaluasi anggaran yang efektif memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi pemborosan, melakukan efisiensi, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan. Oleh karena itu, penganggaran tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada pencapaian tujuan strategis organisasi.

Penganggaran dalam konteks perencanaan dakwah adalah proses strategis dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dakwah secara optimal, efisien, dan bertanggung jawab. Sebagaimana aktivitas lainnya, dakwah memerlukan pendanaan untuk pelaksanaan program seperti pelatihan dai, publikasi materi dakwah, pembangunan sarana dakwah (seperti masjid, pusat kajian Islam), serta kegiatan sosial berbasis dakwah seperti santunan dan bakti sosial. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dakwah harus mempertimbangkan prioritas program, estimasi kebutuhan, dan potensi sumber pendanaan baik dari internal organisasi (infaq, zakat, wakaf) maupun eksternal (donatur, CSR lembaga, atau hibah pemerintah).

Penganggaran dalam dakwah mencerminkan kematangan organisasi dakwah dalam merencanakan masa depan serta menunjukkan profesionalisme dalam mengelola amanah umat. Anggaran yang disusun secara realistis, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif Islam, penganggaran juga menyangkut aspek amanah (trust) dan hisab (pertanggungjawaban), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi dan pengelolaan harta secara tertib. Evaluasi dan pengawasan terhadap

realisasi anggaran dakwah juga menjadi bagian integral dari manajemen dakwah untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan memberikan dampak maksimal bagi umat.

Lebih lanjut, manajemen penganggaran yang baik akan mendukung kesinambungan kegiatan dakwah dalam jangka panjang. Misalnya, organisasi dakwah dapat membuat anggaran jangka pendek untuk program mingguan atau bulanan, serta anggaran jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur dakwah atau pembinaan kader dai. Keseimbangan antara pengeluaran untuk operasional dan investasi jangka panjang perlu diperhatikan agar kegiatan dakwah tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan dan berakar kuat dalam masyarakat.

3. Komponen-komponen Perencanaan Dakwah

Dalam menyusun perencanaan dakwah, terdapat beberapa elemen pokok yang perlu diperhatikan. Tohirin (2007) menyebutkan bahwa komponen utama dalam perencanaan dakwah meliputi: (a) penentuan tujuan dakwah yang bersifat strategis dan operasional, (b) analisis kondisi masyarakat sasaran, (c) penetapan sasaran dakwah yang jelas dan terukur, (d) penentuan strategi dan metode yang tepat, serta (e) pengorganisasian kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Kesemua komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa dakwah dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan mad'u (objek

dakwah). Tanpa struktur yang jelas, pesan dakwah bisa tidak tepat sasaran atau bahkan ditolak oleh audiens.

4. Proses Perencanaan Dakwah

Proses perencanaan dakwah diawali dengan pengkajian terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Setelah memahami tantangan dan potensi, dai atau lembaga dakwah kemudian menetapkan tujuan, menyusun strategi, merancang program kegiatan, dan menentukan indikator keberhasilan. Perencanaan dakwah yang efektif haruslah bersifat adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Evaluasi juga menjadi bagian penting dari proses ini, karena tanpa evaluasi, perencanaan akan menjadi dokumen mati yang tidak bisa meningkatkan kualitas dakwah. Oleh karena itu, perencanaan dakwah idealnya dilakukan secara berkelanjutan dan terbuka terhadap umpan balik.

5. Manfaat Perencanaan dalam Dakwah

Perencanaan yang matang akan memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan dakwah, antara lain memperjelas arah dan sasaran dakwah, mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan profesionalisme dai, serta menciptakan kerja sama tim yang lebih solid. Meskipun dari perspektif manajemen umum, menyatakan bahwa perencanaan mampu meningkatkan motivasi dan komitmen dalam tim karena memberikan kejelasan

peran dan ekspektasi. Dalam konteks dakwah, hal ini sangat relevan karena perencanaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan dakwah yang disampaikan.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dakwah bukan hanya bagian dari teknis manajerial semata, melainkan merupakan implementasi dari prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menyampaikan risalah Islam. Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta pluralitas masyarakat modern, aktivitas dakwah tidak bisa lagi mengandalkan intuisi atau semangat semata. Diperlukan perencanaan yang berbasis data, kontekstual, dan fleksibel agar dakwah Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Selain itu, penulis menilai bahwa perencanaan dakwah yang baik juga mencerminkan profesionalisme dai. Seorang dai bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga dituntut untuk memahami karakteristik masyarakatnya. Oleh karena itu, dakwah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menembus lapisan emosional dan intelektual audiens. Penulis berpandangan bahwa ke depan, perencanaan dakwah juga harus melibatkan multidisiplin ilmu, seperti psikologi, komunikasi, dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas dakwah.

Dakwah yang terencana dengan baik akan mampu mewujudkan peradaban Islam yang rahmatan lil 'alamin, bukan hanya dari sisi isi, tapi juga dari cara penyampaian.

B. Partai Kebangkitan Bangsa

1. Konsep Partai Politik dalam Sistem Demokrasi

Partai politik merupakan institusi kunci dalam sistem politik demokrasi modern. Keberadaan partai politik tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan politik, tetapi juga sebagai medium komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik berperan dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat untuk disalurkan ke dalam kebijakan publik (Budiarjo, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (UU No.2 Tahun 2011).

Selain fungsi penghubung antara rakyat dan pemerintah, partai politik juga menjalankan fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, pengelolaan konflik secara damai, serta penguatan stabilitas demokrasi. Partai politik juga berperan dalam

proses pembentukan opini publik dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan (Hidayat, 2018). Dengan demikian, keberadaan partai politik menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi akan kehilangan instrumen representasi politik rakyat (Surbakti, 2010).

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir pada 23 Juli 1998 pascareformasi sebagai respon atas kebutuhan politik warga Nahdlatul Ulama (NU) dalam sistem demokrasi yang terbuka (Suyatno, 2020). PKB didirikan oleh para tokoh NU, termasuk di dalamnya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai representasi politik kaum nahdliyin .

Secara ideologis, PKB mengusung nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, humanis, toleran, dan menjunjung tinggi keutuhan NKRI (Noor, 2015). PKB tidak memposisikan diri sebagai partai Islam formalistik, tetapi partai yang menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai inspirasi moral perjuangan politik PKB mempromosikan prinsip:

1. kebangsaan dan nasionalisme religius
2. pluralisme dan toleransi
3. keadilan sosial
4. pemberdayaan rakyat kecil dan pesantren (Suyatno, 2020).

Dalam sistem organisasi, PKB memiliki struktur kepengurusan berjenjang mulai dari:

- a. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
- b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
- c. Dewan Pengurus Cabang (DPC)
- d. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)
- e. Ranting dan Anak Ranting

Struktur ini bertujuan memperkuat kinerja organisasi dan konsolidasi basis massa hingga tingkat akar rumput. PKB juga dikenal sebagai partai yang menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan modernitas politik, sehingga sering disebut sebagai representasi politik Islam moderat. Dalam berbagai pemilu nasional, PKB selalu mengambil posisi strategis dalam dinamika politik nasional (Suyatno, 2020).

3. Teori Organisasi Politik dan Struktur PKB

Dalam perspektif teori organisasi politik, partai politik memerlukan struktur yang jelas agar fungsi-fungsinya dapat berjalan efektif (Surbakti, 2010). Struktur ini memungkinkan koordinasi program, konsolidasi kader, serta implementasi kebijakan politik dari pusat ke daerah.

PKB menerapkan model struktur vertikal-hierarkis yang memungkinkan:

- a. efektivitas koordinasi kebijakan
- b. konsolidasi kaderisasi
- c. mobilisasi dukungan politik
- d. penjagaan identitas ideologis partai (Noor, 2015).

Keberadaan DPW sebagai struktur tingkat provinsi menjadi kunci keberhasilan distribusi kebijakan dan penguatan basis organisasi (Suyatno, 2020).

4. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) merupakan representasi PKB di tingkat provinsi. DPW bertugas:

1. mengimplementasikan kebijakan DPP,
2. melakukan pembinaan organisasi tingkat kabupaten/kota,
3. memperkuat kaderisasi dan basis massa,
4. membangun komunikasi politik dengan pemerintah daerah dan masyarakat,
5. melakukan pendidikan politik masyarakat (Suyatno, 2020).

DPW menjadi pusat konsolidasi organisasi di tingkat regional. Keberadaan DPW memungkinkan partai memahami dinamika sosial-politik daerah sehingga kebijakan politik yang diambil lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat lokal (Hidayat, 2018).

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh **Pajri Chaniago (2022)** berjudul *Penggerakan Dakwah Pimpinan Daerah TARBIYAH-PERTI Provinsi Sumatera Barat*, mengkaji strategi organisasi dalam menggerakkan aktivitas dakwah di lingkungan organisasi Islam tradisional. Penelitian ini menemukan bahwa motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan berperan penting dalam menggerakkan kader untuk berdakwah, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.
2. **Muhammad Taufik (2019)** meneliti *Strategi Komunikasi Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa*

Provinsi Riau dalam Mengembangkan Partai. Skripsi ini membahas metode komunikasi politik PKB Riau dalam memperluas pengaruhnya, baik melalui komunikasi langsung kepada masyarakat maupun lewat media sosial. Penelitian ini sangat relevan dengan fokus skripsi Anda, karena membahas PKB dari sisi strategi komunikasi dan pengembangan partai.

3. Penelitian oleh **Ujang Sahabat, Zaenal Mukarom, dan Dewi Sa'diah (2018)** dalam tulisannya berjudul *Perencanaan Dakwah Partai Politik Islam*, menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam aktivitas dakwah partai politik. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap PKS di Jawa Barat, dan menunjukkan bahwa perencanaan dakwah partai perlu terstruktur agar selaras dengan visi politik dan nilai-nilai keislaman.
4. Penelitian oleh **Duwi Adhani (2017)** dalam judul *Fungsi Pengorganisasian Partai Politik dalam Mengembangkan Dakwah Islam* juga menyumbangkan wawasan tentang bagaimana partai politik seperti PKS menyusun dan melaksanakan dakwah berbasis organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa struktur internal dan kaderisasi menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan dakwah partai.

5. Penelitian historis oleh **Beni Kharisma Arrasuli (2008)** dalam *Gerakan Politik Islam di Sumatera Barat (Studi Terhadap Partai PERTI Tahun 1928-1969)* memberikan gambaran tentang akar tradisi politik Islam di Sumatera Barat. Penelitian ini penting sebagai konteks historis untuk memahami bagaimana dakwah politik di daerah tersebut telah berkembang sejak era sebelum kemerdekaan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip prinsip umum. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya atau curiositasnya. Dengan rasa ingin tahunya dan kemampuan

indera serta akalnya, manusia melakukan penjelajahan dan penelusuran terhadap realitas atau fenomena yang terpampang di depannya. Pada proses berikutnya, manusia mulai menemukan dan memahami aturan-aturan dan hukum-hukum baik yang ada di dunia alam maupun dalam dunia sosial. Bahkan, melalui perantaraan wahyu manusia juga memperoleh pengetahuan tentang dunia spiritual (agama). Penemuan dan pemahaman itu memicu lahirnya pengetahuan walaupun sebagiannya masih bersifat spekulatif.

Perkembangan ilmu pengetahuan mulai memasuki babak baru ketika metode ilmiah digunakan dalam mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Upaya manusia melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah memacu akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dengan pesat sehingga melahirkan peradaban manusia yang maju dan canggih. Tidak itu saja, sejumlah bangsa yang giat melakukan penelitian mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsanya menjadi bangsa yang maju dan disegani di dunia. Era sains dan teknologi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kontribusi besar upaya-upaya penelitian yang telah dilakukan selama ini. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dicapai sebagaimana disebutkan di atas mensyaratkan dan mengharuskan adanya penelitian.

Sebab, antara ilmu dan penelitian memiliki hubungan yang sangat erat. Penelitian adalah proses sedang ilmu adalah hasil. Tanpa proses penelitian manusia tidak dapat menghasilkan ilmu dan tidak dapat pula mengembangkannya. Dengan kata lain, tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan menjadi mandek, statis dan ketinggalan jaman.

Menurut Winarno Surakhmat, penelitian itu sesungguhnya sebagian kecil hanya terdiri dari teknik, sedang sebagian besarnya adalah penalaran manusia (peneliti) mulai dari menemukan masalah, pemecahan masalah, sampai pada penarikan kesimpulan, semuanya itu adalah proses berpikir. Karena itu, walau bagaimanapun handalnya metode penelitian sebagai alat, alat itu tidak akan mampu menggantikan kedudukan kemampuan menalar manusia yang menggunakan alat itu. Tanpa didukung oleh kekuatan daya nalar manusia, alat itu tidak akan berarti apa-apa.

Berdasarkan masalah yang muncul pada penelitian ini, maka penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana metode ini merupakan metode yang langsung mengadakan wawancara dan observasi lapangan, yakni kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Belanti Raya, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat .

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana akan dilaksanakannya kegiatan penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Belanti Raya, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat .

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan-informan yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang relevan untuk menjawab kebutuhan penelitian. Yang mana informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak tiga orang, yang terdiri dari: kepala sekretariat sebagai informan utama, ditambah 2 anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat sebagai informan tambahan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder. Maka dari itu yang akan menjadi sumber data bagi penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek baik secara individual maupun kelompok yang dapat menghasilkan observasi berupa benda, kejadian, kegiatan dan hasil dari suatu pengajian tertentu. Pengumpulan data primer terbagi dua yaitu: survey dan observasi (Rosady, 2003). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari hasil wawancara dengan 3 orang informan yang sudah peneliti tentukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media perantara dan dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu dan biasanya berbentuk catatan atau laporan dokumentasi oleh lembaga bersangkutan yang

Dipublikasikan (Rosady, 2003). Adapun data sekunder yang penulis dapat pada penelitian ini adalah dari *website* dan penelitian terdahulu serta dari buku buku para ahli.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau langkah- langkah dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Berikut ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian kualitatif (Muhammad, 2008) :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab dengan narasumber yang dilakukan secara tatap muka dan langsung mendengarkan informasi- informasi yang akan disampaikan oleh narasumber tersebut. Dimana wawancara merupakan suatu proses interaksi antara dua belah pihak yang terjadi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui komunikasi langsung.

Dalam proses wawancara, penulis mengadakan tanya jawab langsung antara pewawancara dan orang yang akan diwawancarai. Dimana pewawancara langsung menanyakan kepada informan yang sudah penulis tetapkan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati untuk mengetahui dan menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan dari observasi yaitu ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat yang melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian sehingga timbul sebuah kesimpulan tentang apa yang sudah diamati.

Pada proses pengumpulan data berdasarkan observasi ini, yang pertama penulis lakukan adalah dengan mengamati dan menyelidiki serta langsung setelah itu mengadakan proses wawancara dengan informan yang sudah penulis tentukan.

3. Dokumentasi

Selain teknik pengumpulan data diatas dokumen juga termasuk salah satu kedalam prosedur pengumpulan data. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu dan sudah pernah diteliti oleh orang-orang atau para ilmu terdahulu. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar ataupun foto. Berdasarkan yang sudah penulis teliti, penulis bisa melihat dan mengambil dokumen dari pengambilan foto-foto di Lokasi wawancara dengan narasumber.

F. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka penulis menghimpun data-data dasar, tidak perlu merencanakan sebab- sebab dan prediksi tentang suatu hal. Setelah data penulis butuhkan terkumpul, maka data tersebut diolah, dengan cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data

Data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dengan narasumber, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari penelitian ini.

2. Memeriksa Data

Meninjau kembali dengan teliti data yang telah dikumpulkan di lapangan melalui wawancara untuk diperiksa kelayakannya. Data yang telah didapatkan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga setelah itu dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya.

3. Menyeleksi Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan diseleksi, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini. Kalau belum cukup maka terlebih dahulu disempurnakan. Maksud dari penyeleksian ini adalah mengambil data-data yang lain.

4. Penyajian Data

Setelah semua data diseleksi, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah penyajian data. Dimana semua data diformat berdasarkan instrumen pengumpulan data dan telah berbentuk tulisan (naratif), langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan penyajian data apa yang dilakukan dan yang diperoleh dan apa yang dihasilkan dalam tahap penyajian data.

5. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini pengumpulan data telah dimulai mencari arti atau makna, pola penjelasan dan sebab akibat, sehingga dengan semua data tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pada mulanya belum jelas kemudian menjadi konkrit dan lengkap. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentang yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Informan Penelitian

Dalam penelitian mengenai DPW PKB Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang informan yang merupakan pengurus DPW PKB Sumatera Barat. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, serta keterlibatan masing-masing informan dalam aktivitas organisasi. Ketiga informan tersebut dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada DPW PKB Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang, dengan alamat kantor di Jalan Belanti Raya No. 03, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pimpinan dan pengurus DPW PKB Sumatera Barat, yaitu Wakil Ketua Dewan Tanfidz, Wakil Bendahara, dan Wakil Sekretaris. Adapun deskripsi masing-masing informan adalah sebagai berikut:

1. Irwandi (Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Sumatera Barat)

Bapak Irwandi merupakan salah satu pengurus DPW PKB Sumatera Barat yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Tanfidz. Dalam struktur organisasi, posisi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepemimpinan, koordinasi, serta pengambilan keputusan

organisasi. Sebagai bagian dari unsur pimpinan Dewan Tanfidz, beliau memiliki keterlibatan dalam berbagai aktivitas dan kebijakan organisasi, baik yang berkaitan dengan konsolidasi internal maupun pelaksanaan program kerja DPW PKB Sumatera Barat. Bapak Irwandi dipilih sebagai informan karena memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pemrograman organisasi, proses penyusunan program kerja, serta perencanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DPW PKB Sumatera Barat. Informasi yang diperoleh dari beliau diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana organisasi menyusun dan menetapkan program, menentukan prioritas kegiatan, serta menyesuaikan program dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, kedudukan sebagai Wakil Ketua Dewan Tanfidz menjadikan Bapak Irwandi sebagai informan yang relevan untuk memberikan penjelasan mengenai proses pemrograman, mulai dari identifikasi kebutuhan organisasi, perumusan program, penentuan tujuan dan sasaran, hingga penetapan program yang akan dilaksanakan oleh DPW PKB Sumatera Barat. Keterangan beliau juga diperlukan untuk memahami bagaimana program yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai aktivitas organisasi.

2. Defni Anita (Wakil Bendahara DPW PKB Sumatera Barat)

Ibu Defni Anita merupakan pengurus DPW PKB Sumatera Barat yang menjabat sebagai Wakil Bendahara. Dalam struktur organisasi, bidang keuangan memiliki posisi yang penting dalam mendukung keberlangsungan berbagai kegiatan dan program organisasi. Sebagai Wakil Bendahara, beliau terlibat dalam membantu pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan organisasi sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kepengurusan. Ibu Defni Anita dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan mengenai aspek penganggaran organisasi, khususnya dalam perencanaan kebutuhan biaya untuk mendukung berbagai program dan kegiatan DPW PKB Sumatera Barat. Informasi dari beliau dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana anggaran disusun, kebutuhan pembiayaan diidentifikasi, serta bagaimana alokasi anggaran disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan oleh organisasi. Selain itu, keterangan dari Ibu Defni Anita juga diperlukan untuk memahami bagaimana penganggaran mendukung kegiatan operasional, program kerja, serta berbagai aktivitas kelembagaan. Aspek tersebut menjadi penting dalam penelitian karena keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan dan program kerja, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Asmardi (Wakil Sekretaris DPW PKB Sumatera Barat)

Bapak Asmardi merupakan pengurus DPW PKB Sumatera Barat yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Dalam struktur organisasi, sekretariat memiliki fungsi penting dalam mendukung administrasi, dokumentasi, komunikasi, serta koordinasi berbagai kegiatan organisasi. Sebagai Wakil Sekretaris, beliau memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan administrasi dan koordinasi internal organisasi. Bapak Asmardi dipilih sebagai informan karena memiliki pemahaman mengenai mekanisme penjadwalan kegiatan organisasi, termasuk proses penyusunan agenda, penentuan waktu pelaksanaan kegiatan,

koordinasi antar pengurus, serta penyesuaian jadwal dengan berbagai kegiatan organisasi. Informasi yang diperoleh dari beliau diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem penjadwalan dijalankan dalam mendukung pelaksanaan aktivitas DPW PKB Sumatera Barat. Keterangan dari Bapak Asmardi juga menjadi penting untuk melihat bagaimana penjadwalan kegiatan dilakukan setelah program organisasi ditetapkan. Penjadwalan yang tertata dan koordinasi yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam memastikan setiap program kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, informasi dari beliau dapat memberikan gambaran mengenai proses pengaturan waktu, koordinasi pelaksanaan, serta kemungkinan penyesuaian jadwal dalam pelaksanaan program kerja DPW PKB Sumatera Barat.

B. Temuan Umum

Gambar 4.1
Kantor DPW PKB Sumatera Barat



Sumber : Kantor DPW PKB Sumatera Barat

1. Profil DPW PKB Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan tentang profil Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat.

Dewan pengurus wilayah DPW partai kebangkitan bangsa PKB Sumatera Barat merupakan kepengurusan partai kebangkitan bangsa di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan kebijakan partai, mengorganisasikan dewan pengurus batang DPC di Kabupaten/Kota, serta mengembangkan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PKB. sebagai dari struktur partai kebangkitan bangsa, DPW PKB Sumatera Barat berperan dalam memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, pendidikan politik, serta pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang melandaskan nilai-nilai Islam ahlussunnah Wal jamaah, demokrasi, keadilan, dan kebangsaan.

PKB secara nasional didirikan pada tanggal 23 juli 1998 sebagai partai politik yang lahir dari semangat reformasi dan pendapatan berpendapat dari kalangan Nahdlatul ulama (NU). Di Sumatera Barat, DPW PKB menjadi perpanjang tangan DPP PKB dalam menjalankan fungsi organisasi, melalui pembinaan terhadap kader, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang demokratis. kegiatan organisasi tidak hanya berorientasi pada kemenangan pemilu, tetapi juga pada pembinaan sumber daya manusia dakwah, pendidikan politik, dan pemberdayaan masyarakat.

DPW PKB Sumatera Barat berkedudukan di kota Padang, dengan alamat kantor di jalan belanti raya NO.03, Lolong belati, kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi tersebut menjadi pusat koordinasi kegiatan organisasi, rapat kepengurusan pendidikan kader, serta pelaksanaan berbagai program partai di wilayah Sumatera Barat.

Struktur organisasi DPW PKB Sumatera Barat terdiri atas dewan Sukro dan dewan tahfidz yang memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan roda organisasi. kepengurusan periode 2026-2031 dipimpin oleh firdaus sebagai ketua dewan Tanfidziyah, didampingi Donizar sebagai sekretaris dan Sultan Alif Baloen sebagai bendahara sedangkan ketua dewan syuro dijabat oleh KH.M.N. Abdullah. Susunan kepengurusan tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan pelayanan dan pengabdian partai kepada masyarakat Sumatera Barat. Pada saat observasi peneliti mendapatkan struktur personalia DPW PKB Sumatera Barat dan abda siyasi PKB.

1. DEWAN SYURA

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	KH. M. N. Abdullah
2	Wakil Ketua	Dr. Syamsul Akmal Dr. Dra. Hj. Yasnida Syamsuddin, M.M.
3	Sekretaris	Drs. Idarussalam, Tk. Sutan
4	Wakil Sekretaris	Rudi Antono, M.Sos. Dr. Hj. Kartini Tume, S.E., M.M. Jasril Dt. Paduko Suanso
5	Anggota	Drs. Syafrizal Dt. Tan Majo Lelo Drs. H. Syeikh Asrul Bakar bin Abu Bakar Syeikh Muhammad Saleh Syeikh Muhammad Mursyid Apendi Moh. Zaher Eko Wahyudi, M.Pd

2. DEWAN TANFIDZ

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Firdaus
2	Wakil Ketua	H. Aminullah Wilya Fansuri Welly Suhery

		Mukhlis, S.T. Erlindawati Irwandi Bagas Panyusunan Nasution Muhammad Ikhbal Octa Rini
3	Sekretaris	Donizar
4	Wakil Sekretaris	Wendriadi Netra Ekawati Lukfi Hardiansyah Asmardi Harry Prima Hidayat Dien Norfita
5	Bendahara	Sultan Alif Baloen
6	Wakil Bendahara	Muhammad Alif Alqadri Emelda Wiguna Defni Anita Yusmeri Winpradilah Yandri Ena Zahari Dewi Yohana

Tabel 4.1 Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat Sisa Masa Bakti 2026-2031.

Dalam menjalankan aktivitasnya DPW PKB Sumatera Barat meniti berangkat program pada karir hasil melalui sekolah kader pertama (SKP), sekolah kader menengah (SKM), pendidikan politik, dakwah sosial keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. program-program tersebut bertujuan mencetak kader yang memiliki integritas kapasitas kepemimpinan dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman kebangsaan dan kemasyarakatan. DPW PKB Sumatera Barat juga aktif membangun kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, tokoh agama,

pemerintah, dan lembaga lainnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mabda Siyasi dan Kebijakan Strategi DPW PKB Sumatera Barat

Gambar 4.2
Poster Mabda Siyasi PKB



Sumber : Kantor DPW PKB Sumatera Barat

a) Kemerdekaan dan Martabat Bangsa Indonesia

Mabda' pertama menempatkan kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia sebagai salah satu dasar perjuangan politik PKB. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa untuk menentukan arah kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan berdasarkan kepentingan nasional. Martabat bangsa berkaitan dengan upaya menciptakan Indonesia yang berdaulat, memiliki posisi yang kuat di tengah pergaulan internasional, serta mampu memberikan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh

rakyat. Dalam konteks organisasi politik, prinsip ini menjadi dasar agar setiap program dan kebijakan yang dirumuskan tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

b) Masyarakat yang Adil dan Berperikemanusiaan

Mabda' kedua menekankan pentingnya mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Keadilan dalam konteks ini mencakup kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh pelayanan publik, mendapatkan perlindungan hukum, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sementara itu, nilai kemanusiaan menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan dan program organisasi harus memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang berada dalam kondisi lemah, rentan, dan membutuhkan perhatian.

c) Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat

Mabda' ketiga menempatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sebagai bagian penting dari perjuangan politik. Hak dasar tersebut mencakup kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kehidupan yang layak, keamanan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif politik, keberadaan partai tidak hanya berkaitan dengan proses memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap program politik idealnya diarahkan pada

pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

d) Kekuasaan sebagai Sarana Perjuangan

Mabda' keempat memandang kekuasaan sebagai sarana perjuangan, bukan sebagai tujuan akhir. Kekuasaan politik merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menerjemahkan gagasan, nilai, dan kepentingan masyarakat ke dalam kebijakan publik. Dengan pandangan tersebut, kekuasaan seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangannya. Kekuasaan tidak semestinya dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

e) Kepemimpinan yang Amanah

Mabda' kelima menekankan pentingnya kepemimpinan yang amanah. Kepemimpinan bukan hanya persoalan kemampuan mengatur organisasi, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Pemimpin yang amanah harus mampu menjalankan tugas berdasarkan kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks organisasi politik, amanah juga tercermin dalam kemampuan pengurus menjalankan mandat organisasi secara konsisten serta mengelola sumber daya organisasi secara bertanggung jawab.

f) Kekuasaan yang Demokratis, Profesional dan Bermanfaat

Mabda' keenam menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan

secara demokratis, profesional, dan bermanfaat. Demokratis berarti proses pengambilan keputusan memberikan ruang terhadap partisipasi, musyawarah, keterbukaan, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Profesional berarti setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan berdasarkan kemampuan, kompetensi, aturan, serta standar kerja yang baik. Sementara itu, kekuasaan yang bermanfaat berarti setiap kewenangan yang dimiliki harus menghasilkan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan tidak berhenti pada penguasaan jabatan, tetapi harus menghasilkan program dan kebijakan yang memiliki dampak positif.

g) Persaudaraan dan Harmoni dalam Keragaman

Mabda' ketujuh menekankan pentingnya persaudaraan dan harmoni dalam keragaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Keberagaman tersebut harus dipandang sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan.

Dalam kehidupan politik, prinsip ini mendorong adanya sikap saling menghormati, membangun dialog, menghindari diskriminasi, serta menciptakan kerja sama di tengah perbedaan. Organisasi dengan masyarakat dan kelompok lainnya.

h) Kepemimpinan Berbasis Humanisme Religius

Mabda' kedelapan menekankan kepemimpinan berbasis humanisme religius, yaitu kepemimpinan yang menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai keagamaan. Kepemimpinan tidak hanya dinilai dari

keberhasilan mencapai target organisasi, tetapi juga dari bagaimana pemimpin memperlakukan manusia secara adil, menghormati martabat setiap individu, serta menjunjung tinggi etika dan moral. Nilai keagamaan menjadi landasan moral dalam menjalankan kepemimpinan, sedangkan humanisme memastikan bahwa orientasi kepemimpinan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat manusia.

i) Keterbukaan dan Kemandirian Partai

Mabda' kesembilan menempatkan keterbukaan dan kemandirian partai sebagai prinsip penting dalam kehidupan organisasi. Keterbukaan berarti organisasi memiliki ruang bagi partisipasi, komunikasi, penyampaian aspirasi, serta penerimaan terhadap berbagai latar belakang masyarakat. Sementara itu, kemandirian berarti partai memiliki kemampuan untuk menentukan sikap, kebijakan, program, dan arah perjuangannya berdasarkan prinsip serta kepentingan organisasi tanpa kehilangan independensi karena tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks manajemen organisasi, prinsip keterbukaan dan kemandirian juga dapat diterapkan dalam proses pemrograman, penjadwalan, dan penganggaran, sehingga setiap kegiatan organisasi dapat direncanakan dan dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan tujuan organisasi.

C. Temuan Khusus

1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat

Ada aspek dan pemrograman, berdasar observasi yang dilakukan peneliti berupaya mengetahui bagaimana DPW partai kebangkitan bangsa TKP Sumatera Barat menyusun program dakwah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. fokus kajian melalui proses perencanaan program, untuk kegiatan yang dirancang, pihak-pihak yang terlibat, tujuan program, hingga langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi berbagai kendala selama pelaksanaan. untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Irwandi menjelaskan bahwa program dakwah yang dijalankan sebenarnya lebih banyak diarahkan pada pembinaan kader atau kaderisasi. Di PKB ada beberapa jenjang kaderisasi, mulai dari Sekolah Kader Pertama (SKP) yang biasanya dilaksanakan di tingkat DPC, kemudian Pendidikan Kader Menengah (PKM) yang menjadi tanggung jawab DPW, hingga Pendidikan Kader Nasional yang dilaksanakan oleh DPP. Selain kaderisasi, juga melaksanakan pengajian, ceramah keagamaan, silaturahmi dengan para kiai, ulama, dan tuanku, serta kunjungan ke pondok pesantren. Program-program tersebut menjadi bagian dari dakwah PKB karena bukan hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan umat melalui kebijakan pemerintah.

Dalam wawancara Bapak Irwandi juga menjelaskan bentuk kegiatan

dakwah itu cukup beragam. Yang paling utama adalah kaderisasi melalui SKP, PKM, dan pendidikan kader tingkat nasional. Selain itu ada pengajian rutin, ceramah agama yang diisi langsung oleh kiai dan ustaz yang menjadi bagian dari keluarga besar PKB maupun Nahdlatul Ulama. PKB juga mengadakan kunjungan ke pesantren, diskusi keagamaan, pelatihan organisasi, serta kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Semua kegiatan tersebut menjadi sarana dakwah sekaligus pembinaan kader partai.

Gambar 4.3
Kegiatan Kaderisasi



Sumber : Kantor DPW PKB Sumatera Barat

Alasan utama program ini dijalankan karena kaderisasi merupakan pondasi utama sebuah partai. Kalau kaderisasi terus berjalan, maka partai akan berkembang, memiliki kader yang berkualitas, dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain itu, PKB sejak awal lahir dari para ulama Nahdlatul Ulama

sehingga nilai-nilai keislaman harus terus dijaga melalui kegiatan dakwah dan pembinaan kader secara berkelanjutan, penjelasan dari Pak Irwandi. Dalam hasil wawancara Pak Irwandi menegaskan bahwa Program ini sangat penting karena melalui kaderisasi dan dakwah, nilai-nilai perjuangan partai dapat ditanamkan kepada seluruh kader. Selain itu, hubungan dengan ulama, kiai, tuanku, dan masyarakat juga semakin kuat. PKB tidak hanya berdakwah melalui ceramah, tetapi juga melalui perjuangan kebijakan seperti Undang-Undang Pesantren, bantuan kepada pesantren, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat kurang mampu, termasuk persoalan BPJS dan program kesejahteraan lainnya. Jadi dakwah yang dilakukan bukan hanya melalui lisan, tetapi juga melalui tindakan nyata.

Secara umum konsep kaderisasi dan program dakwah dirancang oleh DPP PKB sebagai pedoman nasional. Setelah itu DPW dan DPC menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan kaderisasi juga ada instruktur khusus yang telah mendapatkan pelatihan dari DPP sehingga materi yang diberikan tetap sesuai dengan ketentuan partai, ungkap pak Irwandi.

Sedangkan yang terlibat cukup banyak, mulai dari pengurus DPP, DPW, DPC, anggota DPRD dari PKB, instruktur kader, sekretariat partai, hingga para kiai, ulama, ustaz, dan tokoh Nahdlatul Ulama. Semua unsur tersebut saling berkoordinasi agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Biasanya setelah pelantikan kepengurusan dilakukan rapat kerja (Raker) untuk menyusun program selama masa kepengurusan lima

tahun ke depan. Selain itu setiap tahun juga dilakukan penyusunan program kerja tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran.

Informan juga mengungkapkan bahwa pelaksanaannya tidak hanya di kantor DPW atau DPC saja, tetapi juga di pondok pesantren, masjid, musala, aula pertemuan, hingga langsung di tengah masyarakat. Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Program disusun berdasarkan pedoman dari DPP, kemudian dibahas dalam rapat kerja bersama pengurus. Setelah itu ditetapkan menjadi program kerja DPW maupun DPC. Sebelum dilaksanakan dilakukan koordinasi mengenai jadwal, anggaran, narasumber, dan peserta. Setelah kegiatan selesai juga dilakukan evaluasi agar pelaksanaan berikutnya menjadi lebih baik.

Program selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan partai. Fokus utamanya adalah membentuk kader yang memiliki kemampuan organisasi, memperkuat nilai-nilai keislaman, meningkatkan hubungan dengan ulama, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui perjuangan kebijakan di pemerintahan, penjelasan lanjut dari pak Irwandi.

Sementara itu, dalam menghadapi kemungkinan kendala, informan menjelaskan bahwa organisasi biasanya melakukan koordinasi kembali melalui komunikasi antara DPP, DPW, dan DPC. Jadwal dapat diubah atau dipindahkan ke waktu lain. Bahkan apabila suatu DPW belum bisa melaksanakan PKM, kader dapat mengikuti kegiatan di wilayah lain. Yang

terpenting kaderisasi tetap berjalan karena itu merupakan program wajib partai.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, dapat disimpulkan Program dakwah DPW PKB Sumatera Barat telah dirancang secara sistematis dengan menjadikan kaderisasi sebagai perawat utama yang didukung oleh pengkajian, ceramah keagamaan, secara terarahmi dengan ulama, kunjungan kepesantren, dan kegiatan sosial masyarakat.

Program tersebut disusun berdasarkan pedoman DPP PKB, kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah melalui rapat kerja yang melibatkan pengurus partai dan tokoh agama. program ini tidak hanya bertujuan menjaga kualitaskader, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta menunjukkan bahwa melalui tindakan nyata dan perjuangan kebijakan yang merusak kepada kepentingan umat.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemrograman program dakwah pada DPW PKB Sumatera Barat telah dilakukan melalui proses penyusunan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kondisi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry yang menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang melaksanakannya (Terry, 2013). Dengan demikian, penyusunan program dakwah DPW PKB Sumatera Barat yang melibatkan pengurus, kader, instruktur, serta tokoh agama menunjukkan adanya proses

perencanaan yang sistematis.

2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat

Penjadwalan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen dakwah karena berperan dalam mengatur waktu pelaksanaan setiap program agar berjalan secara terarah, teratur, dan sesuai dengan tujuan yang diterapkan. penjabaran yang baik juga memudahkan pengurus dalam melakukan koordinasi, mempersiapkan sumber daya, serta menghindari terjadinya pembentukan antara kegiatan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui bagaimana proses penjawalan program dakwah yang dilaksanakan oleh DPW partai kebangkitan bangsa PKB Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmardi, diketahui bahwa kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh PKB pada umumnya telah memiliki jadwal pelaksanaan masing-masing. Informan menjelaskan bahwa penjadwalan terutama diberlakukan pada kegiatan kaderisasi yang menjadi salah satu program utama organisasi. Kegiatan kaderisasi tersebut meliputi Sekolah Kader Pertama (SKP), Pendidikan Kader Menengah (PKM), dan Pendidikan Kader Nasional. Selain kegiatan kaderisasi, kegiatan dakwah lainnya juga telah direncanakan waktunya, seperti pengajian, ceramah keagamaan, silaturahmi dengan ulama dan kiai, kunjungan ke pondok pesantren, rapat koordinasi, serta pendidikan politik kepada masyarakat.

Menurut keterangan informan, pemberian jadwal pada masing-masing kegiatan dilakukan agar pelaksanaan program tidak dilakukan secara tidak teratur, melainkan memiliki waktu yang jelas sehingga pengurus dan pihak yang terlibat dapat mengetahui kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

Lebih lanjut, informan menerangkan bahwa penjadwalan kegiatan dakwah diperlukan karena dalam pelaksanaan program terdapat berbagai kegiatan organisasi yang harus dikelola secara bersamaan. Jadwal menjadi pedoman bagi pengurus dalam menentukan waktu pelaksanaan sehingga satu kegiatan tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya. Selain itu, dengan adanya jadwal yang telah ditentukan, kader, pengurus, maupun narasumber dapat mempersiapkan kehadiran dan kebutuhan kegiatan terlebih dahulu. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa penjadwalan tidak hanya berkaitan dengan penentuan waktu kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Mengenai pihak yang menyusun jadwal, Bapak Asmardi menjelaskan bahwa penentuan jadwal pada tingkat daerah dilakukan oleh masing-masing DPW dan DPC. Penyusunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah karena setiap wilayah memiliki keadaan organisasi dan agenda kegiatan yang berbeda. Meskipun demikian, khusus kegiatan kaderisasi terdapat pedoman dari DPP yang harus diperhatikan oleh DPW dan DPC. Informan menyampaikan bahwa DPP memberikan ketentuan mengenai jumlah pelaksanaan kegiatan kaderisasi dalam satu tahun,

sedangkan penentuan waktu pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dengan tetap mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan jadwal di tingkat daerah tetap memiliki keterkaitan dengan arahan dari tingkat pusat.

Dalam hal pengawasan terhadap jadwal yang telah disusun, informan menjelaskan bahwa ketua DPW atau DPC bersama pengurus yang membidangi kaderisasi memiliki tanggung jawab dalam memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanggung jawab tersebut mencakup koordinasi dan pengawasan terhadap persiapan kegiatan agar jadwal yang telah disepakati dapat direalisasikan. Informan juga menerangkan bahwa pada kegiatan tertentu, khususnya kegiatan kaderisasi yang mendapatkan pembiayaan dari anggota legislatif, anggota DPRD dari PKB turut memiliki tanggung jawab dalam memastikan kegiatan dapat terlaksana. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jadwal tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus struktural, tetapi juga melibatkan pihak yang berkaitan dengan dukungan terhadap kegiatan.

Berdasarkan keterangan informan, jadwal kegiatan dakwah biasanya mulai ditetapkan setelah rapat kerja organisasi selesai dilaksanakan. Rapat kerja menjadi salah satu tahapan yang digunakan untuk membahas dan menentukan berbagai program yang akan dijalankan, termasuk waktu pelaksanaannya. Setelah jadwal awal ditentukan, waktu kegiatan masih

perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Informan menyebutkan bahwa kesiapan anggaran, narasumber, tempat pelaksanaan, serta kondisi organisasi pada tahun berjalan menjadi beberapa hal yang dipertimbangkan sebelum jadwal tersebut benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu, jadwal yang telah direncanakan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat kondisi tertentu yang memengaruhi kesiapan kegiatan.

Mengenai waktu pelaksanaan kaderisasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat ketentuan khusus dari DPP yang menjadi acuan bagi daerah. Informan menjelaskan bahwa kegiatan kaderisasi diwajibkan dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun. Sementara itu, anggota DPRD dari PKB memiliki kewajiban mengikuti Sekolah Kader Partai (SKP) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Selain mengikuti ketentuan tersebut, pelaksanaan kegiatan juga mempertimbangkan kondisi pendanaan organisasi. Menurut keterangan Ibuk Defni, kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember karena waktu tersebut disesuaikan dengan pencairan

dana bantuan politik dari pemerintah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan agar kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi.

Dalam menentukan lokasi kegiatan, informan menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan masing-

masing kegiatan dakwah. Kegiatan dapat dilaksanakan di kantor DPW maupun kantor DPC apabila kegiatan berkaitan dengan kebutuhan internal organisasi. Sementara itu, kegiatan yang melibatkan masyarakat atau tokoh keagamaan dapat dilaksanakan di aula pertemuan, pondok pesantren, masjid, maupun tempat lainnya. Bapak Asmardi menegaskan bahwa tempat yang dipilih harus merupakan lokasi yang layak dan mampu menampung seluruh peserta kegiatan. Dengan demikian, penentuan tempat tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan teknis pelaksanaan dan jumlah peserta yang akan hadir.

Selanjutnya, mengenai proses penentuan waktu, informan menerangkan bahwa jadwal ditentukan melalui rapat koordinasi antara pengurus. Dalam rapat tersebut, berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan menjadi bahan pertimbangan. Kesiapan peserta menjadi salah satu aspek yang diperhatikan agar kegiatan dapat diikuti oleh pihak yang menjadi sasaran. Selain itu, ketersediaan narasumber, kesiapan lokasi, anggaran kegiatan, dan agenda organisasi lainnya juga diperhitungkan sebelum waktu pelaksanaan ditetapkan. Menurut hasil wawancara, koordinasi tersebut diperlukan agar jadwal yang ditentukan dapat dilaksanakan secara realistis dan tidak menimbulkan benturan dengan agenda organisasi lainnya.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan atau benturan jadwal, Ibuk Defni menjelaskan bahwa organisasi melakukan pembahasan kembali melalui rapat pengurus. Perubahan jadwal dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal. Dalam kondisi peserta tertentu berhalangan mengikuti kegiatan kaderisasi, peserta tersebut tidak serta-merta dianggap tidak mengikuti kaderisasi, tetapi diwajibkan mengikuti pelaksanaan pada kesempatan berikutnya. Informan juga menerangkan bahwa apabila suatu DPW belum dapat melaksanakan PKM, kader dari wilayah tersebut dapat mengikuti kegiatan PKM yang diselenggarakan di wilayah lain. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian dalam penjadwalan agar keterlambatan atau perubahan kegiatan di suatu wilayah tidak menyebabkan proses kaderisasi kader terhenti.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, penjadwalan program dakwah di DPW PKB dilakukan melalui proses yang melibatkan pedoman dari DPP dan penyesuaian oleh DPW maupun DPC. Penetapan waktu mempertimbangkan agenda organisasi, kesiapan peserta dan narasumber, lokasi, serta ketersediaan anggaran. Sementara itu, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, jadwal dapat disesuaikan kembali melalui koordinasi pengurus atau dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk mengikuti kegiatan di wilayah lain. Keterangan informan tersebut memperlihatkan bahwa penjadwalan digunakan sebagai pedoman dalam menjaga keteraturan pelaksanaan kegiatan dakwah sekaligus memberikan ruang penyesuaian ketika terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

penjadwalanya program dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilakukan secara terstruktur untuk memastikan seluruh kegiatan, seperti kaderisasi, pengkajian, ceramah keagamaan, silaturahmi, kunjungan pesantren, rapat koordinasi, dan pendidikan politik, dapat terlaksana secara tertib dan efektif. jadwal disusun oleh pengurus DPW dan DPD dengan mengacu pada pedoman DPP serta disesuaikan dengan kecepatan anggaran, narasumber, peserta, lokasi, dan kondisi organisasi. apabila terjadi perubahan atau benturan jadwal, dilakukan koordinasi dan penyesuaian anggaran seluruh program, terutama organisasi, tetap dapat dilaksanakan. dengan demikian penjawalan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dakwah dan mencapai tujuan organisasi.

3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat

Penganggaran merupakan bagian penting dalam manajemen dakwah karena berkait dengan penyediaan dan pengelolaan dana untuk mendukung pelaksanaan setiap program dakwah. penganggaran yang baik akan membantu organisasi melaksanakan kegiatan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran program dakwah pada DPW partai kebangkitan bangsa (PKB) Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Defni Anita diketahui bahwa anggaran program dakwah mencakup berbagai kebutuhan yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi. Informan menjelaskan bahwa komponen anggaran antara lain digunakan untuk kegiatan kaderisasi, pengajian, pelatihan organisasi, konsumsi peserta, transportasi, akomodasi narasumber, perlengkapan kegiatan, administrasi, dokumentasi, serta biaya operasional selama kegiatan berlangsung. Penyusunan kebutuhan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan jenis dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga setiap kegiatan memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda.

Mengenai pentingnya penyusunan anggaran secara khusus, Ibuk Defni menerangkan bahwa setiap kegiatan dakwah perlu memiliki kepastian pembiayaan sebelum dilaksanakan. Menurut keterangan informan, penyusunan anggaran diperlukan agar kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan sejak awal dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penganggaran juga dilakukan agar dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien serta tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam organisasi.

Dalam proses penyusunan anggaran, informan menyampaikan bahwa pengurus DPW bersama bendahara dan sekretariat partai menjadi pihak yang terlibat dalam menyusun kebutuhan biaya kegiatan. Penyusunan tersebut dilakukan berdasarkan program kerja yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat organisasi. Dengan demikian, anggaran disusun setelah program

yang akan dilaksanakan telah ditentukan, sehingga kebutuhan biaya dapat disesuaikan dengan bentuk kegiatan dan rencana kerja organisasi.

Setelah anggaran disusun, Ibuk Defni menjelaskan bahwa rancangan anggaran tersebut terlebih dahulu dibahas bersama pimpinan partai sebelum disahkan. Proses pengesahan dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku dalam organisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan dari DPP PKB. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan anggaran tidak hanya dilakukan oleh pihak yang menyusun, tetapi melalui pembahasan dan persetujuan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan anggaran dilakukan bersamaan dengan penyusunan program kerja tahunan. Informan menerangkan bahwa anggaran ditetapkan sebelum kegiatan dilaksanakan agar seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program telah dipersiapkan terlebih dahulu. Penetapan anggaran pada tahap perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pengurus dalam mempersiapkan kebutuhan kegiatan sesuai dengan dana yang telah tersedia.

Mengenai sumber dana, Ibuk Defni mengungkapkan bahwa pembiayaan kegiatan dakwah berasal dari beberapa sumber. Sumber tersebut meliputi Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol), iuran anggota DPRD kabupaten/kota, iuran anggota DPRD provinsi, iuran anggota DPR RI, serta iuran fraksi. Selain sumber tersebut, terdapat pula dana operasional partai yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan kegiatan organisasi.

Informan menjelaskan bahwa dana bantuan politik sebagian besar diarahkan untuk kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional organisasi.

Gambar 4.4
Rapat Perencanaan



Sumber : Kantor DPW PKB Sumatera Barat

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Setelah kebutuhan tersebut diidentifikasi, jumlah anggaran kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan partai. Bapak Asmardi menerangkan bahwa rancangan anggaran yang telah disusun selanjutnya dibahas bersama pengurus sebelum ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan proses tersebut, pembiayaan kegiatan disesuaikan antara kebutuhan program dan kemampuan dana yang dimiliki organisasi.

Dalam penggunaan anggaran, pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh bendahara bersama sekretariat partai. Menurut keterangan informan, setiap pengeluaran yang dilakukan harus dilengkapi dengan bukti

pertanggungjawaban atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan penggunaan dana agar setiap pengeluaran dapat diketahui dan dibuktikan penggunaannya. Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh pengurus partai, penggunaan anggaran juga dapat diperiksa oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ibuk Defni juga menerangkan bahwa evaluasi anggaran dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pemeriksaan SPJ dan laporan keuangan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan dana dengan anggaran yang telah direncanakan. Hasil evaluasi selanjutnya dapat dibahas dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) maupun Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Dengan adanya pemeriksaan dan pembahasan tersebut, penggunaan anggaran dapat diketahui kesesuaiannya dengan rencana serta menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan keseluruhan keterangan informan, penganggaran program dakwah dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan kegiatan, menyusun dan membahas anggaran, menetapkan sumber pembiayaan, hingga melakukan penggunaan dan pertanggungjawaban dana. Pengelolaan anggaran melibatkan pengurus, bendahara, dan sekretariat dengan tetap mengikuti mekanisme organisasi serta ketentuan yang berlaku. Setelah kegiatan selesai, penggunaan dana

diperiksa melalui SPJ dan laporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran program dakwah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Penganggaran program dakwah di DPW PKB Sumatera Barat telah dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendukung kelancaran Setiap kegiatan dakwah. anggaran disusun berdasarkan kebutuhan program, sesuai dengan kemampuan keuangan partai, serta bersumber dari bantuan keuangan partai politik (Banpol), iuran anggota legislatif, iuran fraksi, dan dana operasional partai politik. pengelolaan anggaran juga dilaksanakan secara transparansi melalui mekanisme bertanggungjawab, pengawasan, dan evaluasi. Menyusun anggaran yang lebih baik menjadi faktor penting agar seluruh program dakwah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi (Nafarin, 2017).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

D. Analisis Hasil Penelitian

1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terdapat bahwa program dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilaksanakan secara terencana dan sistematis. orang dakwah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan

keagamaan seperti pengajian, ceramah, silaturahmi dengan ulama, ini di pondok pesantren, tapi juga melalui program kaderisasi yang berjenjang yaitu sekolah kaderisasi pertama (SKP),

Pendidikan kader menengah PKN dan pendidikan keadilan nasional. peran tersebut dirancang oleh DPP PKB sebagai pedoman nasional, kemudian dilaksanakan oleh DPW dan DPC sesuai kondisi daerah masing-masing. penyusun program dilakukan melalui rapat kerja, melibatkan berbagai unsur organisasi, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan dakwah partai.

Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi program lan dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen, yaitu adanya penetapan tujuan, penyusunan program kerja, menentukan sasaran serta menyusun langkah-langkah pelaksanaan. sebelum kegiatan dilaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa program dakwah PKB tidak hanya berorientasi pada pembinaan internal pada tapi juga diantaranya untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan perkunjungan kebijakan publik.

2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat bahwa penjadwalan program dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi antara DPP, DPW, dan DPC soal gagasan tersebut dalam rapat kerja organisasi dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, narasumber,

beserta, lokasi, dan agenda organisasi lainnya.

DPP memberikan pedoman mengenai jumlah minimal pelaksanaan kaderisasi setiap tahun, sedangkan DPW dan DPD memiliki wewenang untuk menentukan waktu pelaksanaan sesuai kondisi daerah. apabila terjadi perubahan jadwal atau kendala di lapangan dilakukan kembali sehingga kegiatan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa puncak kolam memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dakwah. dengan adanya dakwah yang jelas, Setiap unsur organisasi memenuhi tugas, waktu, serta bertanggung jawab sehingga kegiatan dapat menjalankan secara efektif dan efisien.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Taufik, 2019) yang menyatakan bahwa penjadwalan merupakan bagian penting dari fungsi manajemen karena fungsi mengatur waktu pelaksanaan kegiatan agar bertujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Penelitian (Beni Kharisma, 2008) juga menyimpulkan bahwa koordinasi dan tinjauan yang baik akan mengurangi hambatan pelaksanaan program adapun perbedaan penelitian ini terletak pada adanya ketentuan khusus dari DPP mengenai kewajiban pelaksanaan kaderisasi secara berkala, sehingga jadwal kegiatan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan daerah, tapi juga mengikuti kebijakan organisasi secara nasional.

3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat bahwa penganggaran program dakwah di DPW PKB Sumatera Barat telah dilakukan melalui proses perencanaan yang sistematis. penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan, kemudian dibahas bersama pengurus sebelum disahkan sesuai mekanisme organisasi.

Sumber pembiayaan berasal dari bantuan keuangan partai politik (Banpol), iuran anggota DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, iuran fraksi, dan dana operasional partai menggunakan anggaran dilakukan secara transparan dengan menyusun laporan pertanggung jawaban (SPJ) yang kemudian dievaluasi dalam musyawarah wilayah (Muawil), Musyawarah cabang (Muscab), serta diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran telah menerapkan prinsip aktivitas efisien akuntabilitas dan transparansi sehingga seluruh kegiatan dakwah memiliki kepastian pembiayaan dan dapat bertanggung jawab dengan pengelolaan anggaran yang baik melaksanakan program dakwah dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nuraini, 2022) yang menjelaskan bahwa penganggaran merupakan unsur penting dalam manajemen organisasi karena menentukan kelancaran pelaksanaan program kerja. pengertian (Mulyadi, 2021) juga menyebutkan bahwa pengawasan dan

evaluasi anggaran melalui laporan pertanggungjawaban menjadi indikator utama akun stabilitas organisasi. perbedaan pernyataan ini adalah adanya pola pendanaan yang khas di DPW PKB Sumatera, Barat yaitu memanfaatkan bantuan keuangan partai politik yang dipadukan dengan iuran anggota legislatif sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan dakwah dan kaderisasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen dakwah partai kebangkitan bangsa (PKB) dan dewan pengurus wilayah (DPW) PKB Sumatera Barat, khususnya pada aspek pemrograman, penjadwalan dan penganggaran maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemrograman dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilaksanakan secara rencana melalui berbagai program pembinaan kader dan kegiatan keagamaan. program utama yang terjadi fokus adalah kaderisasi yang terdiri atas sekolah kader pertama (SKP), pendidikan kader minimal (PKM), dan pendidikan kajian nasional yang menjadi pedoman DPP PKB. terdapat kegiatan pengkajian, ceramah agama, dengan kyai, ulama dan tuanku, kunjungan ke pondok pesantren, serta perjuangan aspirasi masyarakat melalui jalur kebijakan publik seluruh program tersebut bertujuan membentuk badan yang memiliki kemampuan kepemimpinan, memahami nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan fungsi dakwah di tengah masyarakat.
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat seperti Pencak walang program dakwah dilakukan secara sistematis melalui koordinasi antara DPP, DPW, dan DPD. Jadwal kegiatan ditetapkan dalam rapat kerja organisasi dengan memperhatikan agenda tahunan, kesiapan anggaran, ketersediaan narasumber, dan kondisi organisasi. DPP

memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan kaderisasi minimal dua kali dalam satu tahun, sedangkan pelaksanaan teknis disesuaikan oleh masing-masing DPW dan DPC. apabila terjadi kendala atau bentuk jadwal, dilakukan penyesuaian melalui koordinasi sehingga seluruh kader tetap memperoleh kesempatan mengikuti proses kaderisasi.

3. Penganggaran program dakwah disusun berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan dan mengacu pada ketentuan organisasi. sumber pendanaan berasal dari bantuan keuangan partai politik dan (BanPol), iuran anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, anggota DPR RI, iuran fraksi, serta dana operasional partai pengelolaan anggaran dilakukan oleh bendahara dan sekretariat partai. dengan menyerahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. setiap penggunaan dana wajib disertai bukti pertanggungjawaban (SPJ) dan dievaluasi melalui musyawarah wilayah muslim musyawarah cabang (Muscab), mutlak serta pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Secara keseluruhan, manajemen dakwah di PPP PKB Sumatera Barat telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi pemrograman penjadwalan, dan penganggaran secara teratur. pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut mendukung tercapainya tujuan dakwah partai, yaitu membentuk kader yang berkualitas, memperkuat hubungan dengan ulama dan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan umat melalui kegiatan keagamaan dan kebijakan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pemrograman kegiatan dakwah secara lebih terstruktur dan sistematis. Program yang telah dirancang, seperti kaderisasi, pengajian, ceramah keagamaan, silaturahmi dengan ulama dan kiai, kunjungan ke pondok pesantren, serta kegiatan sosial, hendaknya terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kader dan masyarakat. Selain itu, setiap program sebaiknya memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang lebih jelas agar pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Pemrograman juga perlu tetap bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan teori pemrograman yang menekankan pentingnya penyusunan langkah-langkah kegiatan secara sistematis serta adanya alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan.
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan sistem penjadwalan kegiatan dakwah agar seluruh program dapat terlaksana secara lebih efektif dan teratur. Penyusunan jadwal hendaknya mempertimbangkan kesiapan peserta, narasumber, tempat, sumber daya, serta anggaran yang tersedia. Selain itu, perlu disiapkan jadwal alternatif apabila terjadi perubahan atau benturan dengan kegiatan organisasi lainnya.

Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pencairan dana bantuan politik, maka DPW PKB Sumatera Barat perlu membuat perencanaan waktu yang lebih fleksibel agar kegiatan dakwah tetap dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan penganggaran kegiatan dakwah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan anggaran hendaknya disesuaikan dengan prioritas program serta kebutuhan masing-masing kegiatan, sehingga sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, evaluasi antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran berikutnya. Kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan laporan keuangan juga perlu terus dipertahankan agar pengelolaan dana kegiatan dakwah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan organisasi. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menjamin keberlangsungan program dakwah DPW PKB Sumatera Barat.

C. Keterbatasan penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya memfokuskan kajian pada fungsi manajemen dakwah yang meliputi program, penjawalan, dan penganggaran di DPW PKB Sumatera Barat. dari hasil wawancara dengan narasumber tertentu sehingga hasil penelitian. masih terbatas pada konteks organisasi yang diteliti berarti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak informasi dan mengkaji seluruh fungsi manajemen dakwah agar diperoleh hasil yang lebih banyak informasi yang mengkaji seluruh fungsi manajemen dakwah agar diperoleh hasil yang lebih mendalam.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adhani, Duwi. (2017). *Fungsi Pengorganisasian Partai Politik dalam Mengembangkan Dakwah Islam*.
- Alfian, (2018), *Manajemen Perencanaan Dakwah*, Jurnal Manajemen Dakwah, Ardiyansah, Nur Rofiq, dkk (2021), *Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Mendongkrak Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Kabupaten Pati*, Jurnal Pemikiran Politik Islam, 4.2.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2014). *Management control systems* (14th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Anwar, M. (2016). *Kebangsaan dan Moderasi dalam Dakwah Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arrasuli, Beni Kharisma. (2008). *Gerakan Politik Islam di Sumatera Barat (Studi Terhadap Partai PERTI Tahun 1928–1969)*.
- Aziz, Abdul. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.
- Aziz, Muhammad. (2012). *Manajemen Dakwah: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2003). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu.
- Bachtiar, W. (2014). *Sosiologi Politik Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Chaniago, Pajri. (2022). *Penggerakan Dakwah Pimpinan Daerah TARBIYAH-PERTI Provinsi Sumatera Barat*.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Partai Politik di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen* (Ed. 2). BPFE Yogyakarta.
- Hasanah, Uswatun. (2010), *Manajemen Dakwah*, Pamekasan : Kaff Publishing
- Hilmy, Masdar.(2017). *Islamism and Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS. Hasanah, Uswatun. (2010), *Manajemen Dakwah*, Pamekasan : Kaff Publishing
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hidayat, M. (2015). *Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada. Karyoto. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Karyoto. (2002). *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Miriam, Budiarjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad, (2008), *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Muhammad Qodaruddin, Abdullah (2019), *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Qiara Media
- Mulyadi, A. (2003). *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi. (2012). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Kencana.
- Mustain, (2011) *Materi Manajemen Dakwah*, Jakarta : Direktorat Penerangan Agama Islam
- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Natsir, M. (2008). *Fiqhud Da'wah: Jejak Risalah dan Strategi Dakwah*. Capaian Pres.
- Noor, Firman.(2015) *Partai Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Rahardjo, M. Dawam. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Ramlan, Surbakti (2010) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ridla, Muhammad Rosyid, (2008), *Perencanaan Dalam Dakwah Islam, Jurnal Dakwah*, 9.2
- Ruslan, Rosady, (2003), *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Sahabat, Ujang., Mukarom, Zaenal., & Sa'diah, Dewi. (2018). *Perencanaan Dakwah Partai Politik Islam*.
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyatno.(2020). *PKB dan Basis Politik Nahdliyin*. Jakarta: LP3ES.
- Taufik, Muhammad. (2019). *Strategi Komunikasi Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau dalam Mengembangkan Partai*.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R, (2013), *Dasar Dasar Manajemen* Malang : Inteligensia
- Tohirin. (2007). *Manajemen Dakwah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Wahid, Abdurrahman, dkk. (1998). *Pro-Kontra Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Fatma Press.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Berita Acara

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Alamat: Sungai Bangkik Kelurahan Bahai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Kode Pos: 25171 Website : www.uinib.ac.id E-mail: admin_fdk@uinib.ac.id

BERITA ACARA

Tim Seminar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang telah mengadakan Seminar Proposal skripsi Mahasiswa :

Nama	Halimatul Fikri
NIM	2112030041
Fakultas/ Prodi	FDIK / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	Perencanaan Dakwah Rerata Masyarakat Bangsa Suku Perumahan Wilayah Simalak Bumi

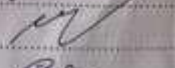
Pada :

Hari/ Tanggal	Rabu / 28 Mei 2025
Pukul	08.00
Tempat	Ruang Saling / Seminar 1

Hasil seminar menyatakan bahwa : DITERIMA/ DITOLAK dengan ketentuan sebagai berikut :

Padang, 28 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua/ Narasumber	1. Drs. Alfian Hal	()
Narasumber	1. Drs. Alfian Hal	()
	2. Arina Fransiska Hal	()
Mahasiswa Ybs	Halimatul Fikri	()

Lampiran 2

Surat Tugas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Alamat: Kampus III Sungai Bangko, Kelurahan Balai Gadang Kec. Kota Tengah,
Fax (0751)24088 Website : www.uinib.ac.id E-mail: admin_fdk@uinib.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B. 1926 /Un.13/FDIK/PP.00.9/05/2025

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang dengan ini menugaskan kepada saudara :

1. Drs. Alfian, MM : Ketua/ Nara Sumber
2. Arina Fransiska, MM : Sekretaris/ Nara Sumber

Untuk menjadi Nara Sumber Seminar Proposal skripsi mahasiswa :

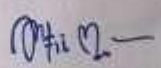
Nama	:	Hidayatul Fikri
NIM	:	2112030041
Jurusan	:	Manajemen Dakwah (MD)
Judul Skripsi	:	Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat

Yang Insyaallah diadakan pada :

Hari/ Tanggal	:	Rabu / 28 Mei 2025
Pukul	:	08.00 s.d selesai
Tempat	:	Ruang Sidang/Seminar 1

Demikianlah surat tugas ini diberikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Padang, 26 Mei 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.


Wanda Fitri
NIP. 196912181995032001

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Lampiran 3

SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG NOMOR : 854 Tahun 2026

Tentang Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Hidayatul Fikri / NIM. 2112030041 Program Studi S-1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang tanggal 10 Februari 2026 perihal pengesahan judul skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi tersebut perlu pengesahan judul oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kelengkapan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor : 025.04.2.424050/2024 tanggal 02 Desember 2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S-1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul skripsi mahasiswa a.n. Hidayatul Fikri NIM: 2112030041 dengan judul *Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat*
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian SKRIPSI tersebut.
- | | |
|---|--|
| <p>Nama : Drs. H. Aifan, MM.</p> <p>Pangkat/Jabatan/Gol : Pembina Tk. I (Lektor Kepala)(V/b)</p> <p>Bidang Keahlian : Manajemen</p> <p>MK yang diasuh : Sistem Informasi Manajemen Dakwah</p> <p>Sebagai Pembimbing I (materi), dan</p> <p>Nama : Anna Fransiska, MM.</p> <p>Pangkat/Jabatan/Gol : Penata Muda TK. I (Il/b)</p> <p>Bidang Keahlian : Manajemen SOM</p> <p>MK yang diasuh : Pengantar Ilmu Manajemen</p> <p>Sebagai Pembimbing II (metode)</p> | <p>Tugas Pembimbing</p> <p>Pembimbing I : Membimbing dan menguji ujian munagasyah</p> <p>Pembimbing II : Membimbing dan menguji ujian munagasyah</p> |
|---|--|
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 10 Februari 2026
Dekan,



Tembusdampelkankepada:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang
2. Sdr. Ketua Program Studi S-1 Manajemen Dakwah
3. Sdr. Dosen Pembimbing II.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Nama : Hidayatul Fikri
Nim : 2112030041
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : "Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat"

Batasan Masalah	Pertanyaan
1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat	1. Apa saja program dakwah yang direncanakan oleh DPW PKB Sumatera Barat? 2. Apa bentuk kegiatan yang dimasukkan dalam program dakwah tersebut? 3. Mengapa program dakwah tersebut disusun dan dijalankan? 4. Mengapa program tersebut dianggap penting untuk mencapai tujuan dakwah partai? 5. Siapa yang merancang dan menyusun program dakwah di DPW? 6. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam perencanaan program dakwah? 7. Kapan proses penyusunan program dakwah dilakukan? 8. Di mana program dakwah direncanakan untuk dilaksanakan?

	9. Bagaimana tahapan penyusunan program dakwah dari perencanaan sampai penetapan? 10. Bagaimana program dakwah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dakwah DPW? 11. Bagaimana upaya organisasi dalam menyiapkan langkah-langkah cadangan atau solusi alternatif apabila terjadi kendala atau perubahan situasi saat pelaksanaan kegiatan di lapangan
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat	1. Apa saja kegiatan dakwah yang memiliki jadwal pelaksanaan? 2. Mengapa kegiatan dakwah perlu dijadwalkan secara khusus? 3. Siapa yang menyusun jadwal kegiatan dakwah? 4. Siapa yang bertanggung jawab memastikan jadwal berjalan? 5. Kapan jadwal kegiatan dakwah ditetapkan? 6. Kapan biasanya kegiatan dakwah dilaksanakan (rutin / momentum tertentu)? 7. Di mana kegiatan dakwah dijadwalkan berlangsung? 8. Bagaimana proses penentuan waktu pelaksanaan kegiatan dakwah? 9. Bagaimana penyesuaian jadwal jika terjadi perubahan atau benturan kegiatan?

3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat	1. Apa saja komponen anggaran dalam program dakwah DPW? 2. Mengapa program dakwah perlu disusun anggarannya secara khusus?
	3. Siapa yang menyusun anggaran kegiatan dakwah? 4. Siapa yang menyetujui dan mengesahkan anggaran tersebut? 5. Kapan anggaran kegiatan dakwah direncanakan dan ditetapkan? 6. Dari mana sumber dana untuk kegiatan dakwah berasal? 7. Bagaimana proses penyusunan anggaran program dakwah? 8. Bagaimana mekanisme penggunaan dan pengawasan anggaran dakwah? 9. Bagaimana evaluasi anggaran setelah program dakwah dilaksanakan?

Lampiran 5

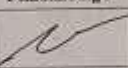
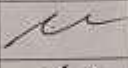
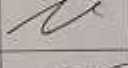
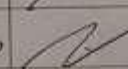
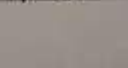
Bukti Konsultasi Bimbingan

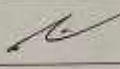


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Alamat: Sungai Bangsek Balai Gadang, Kec. Koto Tangah Kota Padang
 Kode Pos: 25171 website: www.uinib.ac.id email: admin_fdik@uinimambonjol.ac.id

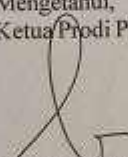
BUKTI KONSULTASI DENGAN PEMBIMBING

Nama : Hidayatul Fikri
 NIM/Jurusan : 2112030041 / Manajemen Dakwah
 Pembimbing I : Drs. Alfian, MM
 Pembimbing II : Arina Fransiska, MM

No.	Hari/Tanggal	Hasil Konsultasi	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Selasa 10/03/2025	Revisi Teori		
2.	Kamis 12/03/2025	Ganti Teori		
3.	Kamis 26/03/2025	Revisi Penulisan		
4.	Selasa 09/04/2025	Acc Revisi Proposal		
5.	Selasa 24/02/2026	Bimbingan Revisi Pedoman Wawancara		
6.	Selasa 03/03/2026	Acc Pedoman Wawancara dari Pembimbing II		
7.	Senin 30/03/2026	Bimbingan Bab 4		
8.	Senin 13/04/2026	Revisi Bab 4 penulisan		
9.	Kamis 17/04/2026	Revisi Penulisan		
10.	Kamis 07/05/2026	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5		
11.	Kamis 18/06/2026	Revisi Bab 4 dan 5		
12.	Selasa 14/07/2026	Revisi Analisa Penelitian		

13.	Kamis 06/08/2026	REVISI BAB 4 terkait HASIL OBSERVASI dan Deteksi		
14.	Senin 10/08/2026	Revisi dan perbaikan Abstrak dan penulisan		
15.	Jumat 14/08/2026	Acc Bab 4 dan Bab 5 Pembimbing II		
16.	Selasa 18/08/2026	Acc Bab 4 dan Bab 5 lanjut Sidang Munagrasah		

Padang,
Mengetahui,
Ketua Prodi PMI


Dr. Zulbadri, M. Ag
NIP. 197209082000031002

Lampiran 6

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang 25153 Telp. (0751) 24686
Fax. (0751) 24686 Website : //www.uinib.ac.id E-mail admin_fdk@uinib.ac.id

Nomor : B.1166/Un.13/FDIK/PP.00.9/04/2026 Padang, 8 April 2026
Lamp : -
Perihal : Penerbitan Surat Izin/
Rekomendasi Penelitian

Yth:
Kepala Kantor Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat

Assalamualaikum wr.wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Hidayatullah Fikri
Nomor BP	: 2112030041
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Program Studi	: Manajemen Dakwah (MD)
Kegiatan	: Pengambilan Data Skripsi
Waktu Penelitian	: April 2026 s.d Juni 2026
Tempat/Lokasi	: Jl. Balanti Raya No.03 Lolong Balanti, Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Penyelesaian Studi S1
Judul	: Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Barat

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut diatas bersama ini kami mohon bantuan Bapak untuk dapat menerbitkan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



97508012006041003

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Lampiran 7

Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian


**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PROVINSI SUMATERA BARAT**
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 154/DPW-13/02/VIII/2026

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim
Salam slaturrahim, teriring do'a semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FIRDAUS, S.HI
Jabatan	: Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat
Nama	: DONIZAR
Jabatan	: Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Hidayatul Fikri
Nomor BP	: 2112030041
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Fakultas	: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Universitas	: UIN Imam Bonjol Padang

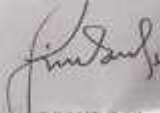
Telah melakukan penelitian di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat, untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perencanaan Dakwah Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat".

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul Muwaffiqilaa Aqwaamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 14 Agustus 2026

**DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

 FIRDAUS, S.HI Ketua		 DONIZAR Sekretaris
--	---	--

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Yogyakarta C1 Asatek Ulak Karang selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang 25134 HP 081374577772 |
EMAIL : dpw_sunbar@pkb.or.id| pkbsunbar@gmail.com



Lampiran 8. Ruang Rapat



Lampiran 9. Ruang Pimpinan



Lampiran 9. Narasumber



Lampiran 10. Narasumber



Lampiran 11. Kegiatan BIMTEK DPW PKB



Lampiran 12. Rapat PKB

BIODATA PENULIS



Nama : Hidayatul Fikri
Tempat/Tgl. Lahir : Air Sikambing, 27 Maret 2026
Negeri Asal : Air Sikambing, Air Haji Tenggara, Pesisir Selatan
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Program Studi : Manajemen Dakwah
No HP : 082275740929
Email : hidayatulfikry847@gmail.com

DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Alm. Josman
Nama Ibu : Kartini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
2. Jumlah Saudara : 6 bersaudara
3. Anak Ke : 4 (Keempat)
4. Alamat : Air Sikambing, Air Haji Tenggara, Pesisir Selatan

PENDIDIKAN YANG DI TEMPUH

1. SDN 12 Air Sikambing
2. MTsN 5 Pesisir Selatan
3. MAN 4 Pesisir Selatan
4. UIN Imam Bonjol Padang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus HMP MD, Bidang Kominfo Tahun 2022
2. Ketua Umum DEMMA FDIK Periode 2023/2024
3. Ketua Umum DEMMA FDIK Periode 2024/2025
4. Ketua Umum DEMMA UIN Imam Bonjol Padang Periode 2025/2026